LAPORAN AKHIR

INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017-2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan terkait suatu kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau dapat pula diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan rumus tertentu yang melibatkan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita.

ICOR merupakan kependekan dari *Incremental Capital Output Ratio* yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur besarnya tambahan output kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikan atau menambah satu unit output. Pengkajian mengenai ICOR sangat diperlukan mengingat ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada pada setiap daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo.

Publikasi ICOR Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021 ini berusaha melihat pengaruh investasi yang telah dilakukan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat diperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan. Data-data pendukung terkait dalam publikasi ini berasal dari beberapa sumber diantaranya dari hasil survei maupun hasil publikasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

Terima kasih dan hormat kami tunjukkan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Semoga penulisan buku ini dapat memberikan kemanfaatan dan kemajuan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iv**

Daftar Gambar ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Permasalahan 4

1.3 Tujuan 4

1.4 Cakupan 5

1.5 Sistematika 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan 7

2.2 Tinjauan Teoretis 16

2.2.1 Pengertian ICOR 16

2.2.2 Pengertian Investasi 22

2.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 24

2.2.4 Pengertian Output 28

2.2.5 Pengertian Nilai Tambah 29

BAB III METODE KAJIAN

3.1 Data dan Sumber Data 30

3.2 Estimasi PMTB Menurut Lapangan Usaha 31

3.3 Metode Penghitungan ICOR 32

BAB IV INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RASIO (ICOR) KABUPATEN SIDOARJO

4.1 Perekonomian Kabupaten Sidoarjo 36

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo..... 37

4.1.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha..... 43

4.1.3 Struktur Investasi Menurut Sektor 54

4.1.4 Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran 74

4.1.5 Industri Kecil, Menengah dan Besar 82

4.1.6 Investasi PMTB 83

4.2 Hasil Perhitungan dan Analisis ICOR 83

4.2.1 Hasil Perhitungan ICOR 85

4.2.2 Hasil Perhitungan ICOR Per Sektor..... 88

4.2.3 Analisis Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 94

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 98

5.2. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2021 (Milliar Rupiah) 37

Tabel 4.2 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 (persen) 39

Tabel 4.3 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya (Gerbangkertosusilo) Tahun 2017-2021 (persen) 41

Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo 2017–2021 44

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2021 46

Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha yang terjadi di tahun 2017-2021 49

Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada kategori-kategori lainnya yang terjadi di tahun 2018-2019 (persen) 51

Tabel 4.8 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021 56

Tabel 4.9 Nilai Investasi Sektor Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021 59

Tabel 4.10 Nilai Investasi Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021 60

Tabel 4.11 Nilai Investasi Sektor Konstruksi di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021 61

Tabel 4.12 Nilai Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 63

Tabel 4.13 Nilai Investasi Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 64

Tabel 4.14 Nilai Investasi Sektor Pertanian di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 66

Tabel 4.15 Nilai Investasi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 67

Tabel 4.16 Nilai Investasi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 68

Tabel 4.17 Nilai Investasi Sektor Jasa Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 69

Tabel 4.18 Nilai Investasi Sektor Real Estate di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 70

Tabel 4.19 Nilai Investasi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 71

Tabel 4.20 Nilai Investasi Sektor Jasa Lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 72

Tabel 4.21 Nilai Investasi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021 73

Tabel 4.22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 74

Tabel 4.23 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 76

Tabel 4.24 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%) 78

Tabel 4.25 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%) 79

Tabel 4.26 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2021 (%)..... 80

Tabel 4.27 Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)..... 81

Tabel 4.28 Jumlah Unit Usaha Kecil Menengah dan Besar, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Tahun 2017-2021 Kabupaten Sidoarjo 83

Tabel 4.29 ICOR Lag-0 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 85

Tabel 4.30 ICOR Lag-0 Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 88

Tabel 4.31 ICOR Lag-1 Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021. 90

Tabel 4.32 ICOR Lag-2 Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistematika Penganalisisan ICOR Kabupaten Sidoarjo 2022 6

Gambar 4.1 Grafik PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2021 38

Gambar 4.2 LajuTingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 (persen)..... 40

Gambar 4.3 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya (Gerbangkertosusilo) Tahun 2017-2021 (persen)..... 42

Gambar 4.4 Rata-rata Laju Pertumbuhan Periode 2018-2021 Menurut Sektor (persen)..... 54

Gambar 4.5 Struktur Investasi Menurut Sektor Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 55

Gambar 4.6 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Berlaku Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 di Kabupaten Sidoarjo 84

Gambar 4.7 Rata-rata nilai ICOR dengan penghitungan ICOR lag-0, ICOR lag-1 dan ICOR lag-2 87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menjelaskan bahwa Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terutama dalam bidang perekonomian agar tidak terjadi kesenjangan serta meluasnya tingkat kemiskinan. Dengan perekonomian yang baik harapan dan cita-cita pemerintah untuk memakmurkan masyarakatnya dapat terpenuhi.

Dalam rangka memakmurkan masyarakat, semua daerah mempunyai tujuan utama yaitu pemenuhan pembangunan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat menentukan tingkat kesejahteraan bagi penduduknya. Banyaknya rangkaian usaha serta kebijakan mengenai perekonomian dirancang dengan seksama guna memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Upaya ini dapat mengurangi tingkat pengangguran, mempersempit kesenjangan kehidupan diantara kaya dan miskin. Meski demikian, terdapat ketidak sempurnaan dalam merencanakan pembangunan ekonomi yaitu adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Apabila terdapat keterbatasan, target yang telah ditentukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi daerah agar dapat diatasi dengan baik dan cepat. Salah satu yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya adalah dengan cara investasi.

Investasi adalah solusi yang tepat yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalahnya menjadikan harus terdapatnya suatu indikator yang realistis yang digunakan untuk mengukur investasi. Ukuran atau indikator tersebut kita kenal dengan sebutan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Adanya perhitungan yang menggunakan ICOR, menjadikan pemerintah daerah mengetahui tambahan output maupun tambahan modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu pemerintah daerah dirasa tidak akan kesulitan dalam menentukan berapa besarnya investasi yang dibutuhkan agar target pertumbuhan perekonomian sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya.

Sidoarjo adalah kabupaten yang sebagian besar perekonomiannya bergerak di bidang industri dan UMKM. Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 yaitu sebanyak 1.106 (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika ditinjau secara geografis, Sidoarjo merupakan kabupaten yang strategis dan terletak berdekatan dengan Surabaya sebagai ibukota Jawa Timur yang dapat menguntungkan bagi pertumbuhan industri. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah Sidoarjo menarik dan menggerakkan sejumlah investor agar dapat berinvestasi, karena memperbaiki iklim investasi merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan. Selain industri, UMKM juga diyakini akan bertahan dari berbagai goncangan perekonomian di daerah. Oleh karena itu, banyak kebijakan seperti pinjaman modal diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan dapat melahirkan banyak pelaku UMKM. Selain untuk melahirkan pelaku UMKM baru, dengan adanya pinjaman modal yang diberikan diharapkan semua pelaku UMKM dapat bertahan dan menjadi bentuk dorongan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Kondisi investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan, pasalnya di akhir tahun 2020 terdapat 11 perusahaan yang pindah dari Sidoarjo. Sebagian besar perusahaan tersebut adalah perusahaan padat karya. Alasan terbesar pindahnya beberapa perusahaan dari Kabupaten Sidoarjo adalah tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Harian Bhirawa, 13 Desember 2020). Kondisi tersebut terus terjadi hingga tahun 2021. Terdapat sembilan belas perusahaan yang ekspansi ke daerah lain, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo hanya tersisa kantornya saja. Di tahun yang sama terdapat 94 perusahaan menengah ke bawah yang pindah. Alasannya juga sebagian besar karena Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo yang tinggi (Suara Jatim, 2021).

Pandemi Covid-19 juga berakibat pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Diberitakan 95% usaha UMKM di Kecamatan Tanggulangin mengalami kebangkrutan akibat pandemi. Masyarakat yang kesehariannya disibukkan sebagai pengrajin kulit rumahan, kini dengan terbatasnya aktivitas yang dilakukan berdampak sepinya order tas, dompet, koper kulit dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan agar sentra kulit di Kabupaten Sidoarjo tidak hilang, mengingat kualitas kulit yang diproduksi sudah terkenal tidak hanya di Sidoarjo melainkan luar Sidoarjo yang dapat meningkatkan ekonomi kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat mempertahankan UMKM dengan memberikan suntikan dana melalui investasi dari pihak ketiga agar dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo.

Peranan pemerintah diperlukan sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum juga sering menjadi

alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Hasil perhitungan ICOR pada tahun 2020 memperlihatkan rata-rata ICOR lag-2 sebesar dengan kategori cukup efektif. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata ICOR Lag-1 dan lag-0 masing-masing sebesar 5,57 dan 6,01 dengan kategori cukup efektif. Karenanya pengukuran ICOR 2022 penting untuk dilakukan untuk mengetahui perkembangan nilai investasi, peran dan struktur investasi di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam penyusunan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Sidoarjo ini ada poin pertanyaan penting yang patut diajukan. Adapun pertanyaan tersebut adalah sejauhmana *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang ada di Kabupaten Sidoarjo dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditentukan?

1.3 Tujuan

Penyusunan ICOR bertujuan untuk mencari dasar yang relevan bagi perencanaan investasi yang dibutuhkan Kabupaten Sidoarjo guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Adapun secara khusus tujuan dari penyusunan analisis ICOR ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai perkembangan nilai investasi total dan sektoral selama periode 2017-2021.
2. Memberikan gambaran mengenai perkembangan peran investasi dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo selama periode 2017-2021.
3. Memberikan gambaran mengenai perkembangan struktur investasi Kabupaten Sidoarjo selama periode 2017-2021.

4. Menyajikan besaran koeffisien ICOR secara total maupun sektoral Kabupaten Sidoarjo selama periode 2017-2021.

1.4 Cakupan

Dalam tulisan ini akan disusun ICOR Kabupaten Sidoarjo baik secara total maupun menurut sektor selama periode 2017-2021. Penyusunan ICOR menurut sektor sedikit banyak akan memberikan informasi kepada investor mengenai sektor-sektor mana yang menarik untuk dimasuki terutama apabila dilihat dari perspektif tingkat pengembalian dan efisiensi investasi.

1.5 Sistematika

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan yang membahas latar belakang, permasalahan, tujuan, dan cakupan

Bab II. Tinjauan Pustaka yang membahas kebijakan, konsep dan definisi mengenai pengertian ICOR, investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), output dan nilai tambah.

Bab III. Metode Kajian yang membahas metodologi yang meliputi data dan sumber data, estimasi PMTB, dan metode penghitungan ICOR.

Bab IV. Analisis ICOR yang membahas perkembangan ICOR menurut lag.

Bab V. Penutup yang membahas kesimpulan dari penulisan ini dan saran yang bisa diberikan oleh penulis.

Sistematika Penganalisisan ICOR Kabupaten Sidoarjo 2022

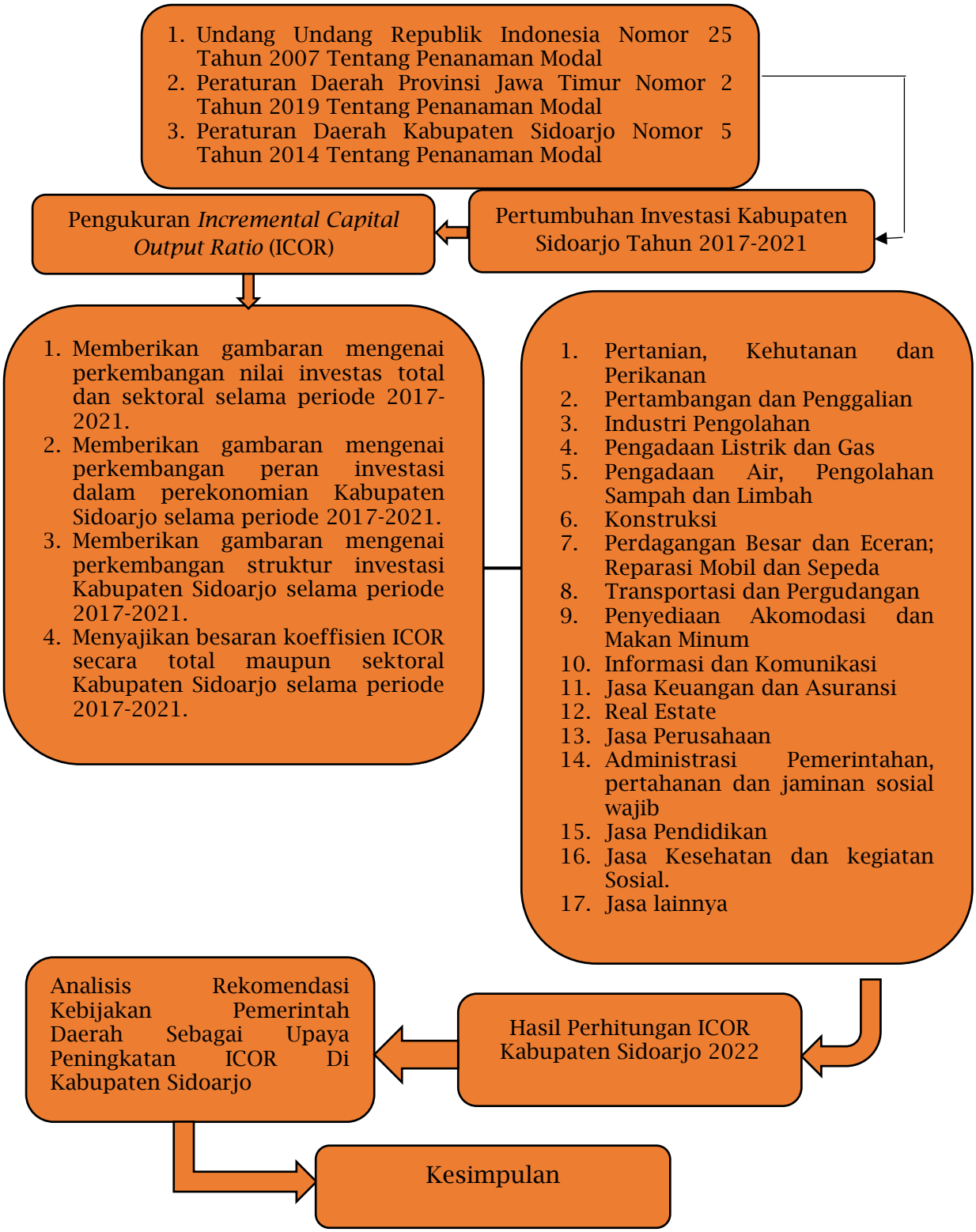

Sistematika Penganalisisan ICOR Kabupaten Sidoarjo 2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan

ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka

penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi.

Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.

Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus

didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

Pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan melalui deregulasi penanaman modal; pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan pemberdayaan usaha. Deregulasi penanaman modal dilakukan melalui kajian dan evaluasi jenis perizinan, rekomendasi dan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah diatur dalam produk hukum Daerah. Kajian dan evaluasi jenis perizinan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah atau kearifan lokal. Deregulasi penanaman modal dilaksanakan melalui tahapan : pengklasifikasian; penghapusan; penggabungan; perubahan nomenklatur; atau penyesuaian

persyaratan. Deregulasi penanaman modal dilaksanakan oleh Gubernur dengan menugaskan Biro Hukum; dan DPRD dengan menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan deregulasi penanaman modal, Gubernur dan DPRD melibatkan DPMPTSP. Hasil deregulasi penanaman modal yang dilakukan oleh Gubernur dan DPRD, dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan atau pencabutan produk hukum Daerah.

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah dilaksanakan melalui identifikasi potensi penanaman modal di Daerah; pemetaan peluang penanaman modal di Daerah; dan pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

Pemberdayaan usaha dilaksanakan melalui fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal; pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; dan/atau pengembangan usaha rintisan (start up).

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan dapat berbentuk

penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal; fasilitasi dan koordinasi penjajagan penanaman modal dengan pihak terkait; menjalin kerja sama dalam rangka persiapan penanaman modal; percepatan pemberian perizinan; fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial; fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal; dan/atau fasilitasi penyediaan energi.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana dari penanam modal; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang semakin sejahtera.

Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi

yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah, khususnya di Sidoarjo.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit

output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Secara teoritis hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat, (1939) dan Sir Roy Harrod, seorang ekonom Inggris, (1947), mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Namun karena kedua teori tersebut banyak kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (*output*).

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi:

a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan sepenuhnya.
b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
c. Besarnya tabungan masyarakat adalah merupakan fraksi tertentu dari besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarannya tetap, demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio* = COR) dan

rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR).

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

(i) Rasio Modal – Output atau Capital Output Ratio (COR) atau sering disebut sebagai Average Capital Output Ratio (ACOR), yaitu perbandingan antara kapital yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.

(ii) Rasio Modal – Output Marginal atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini Iebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital.

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Dimana :

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal

baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi :

$$\mathbf{ICOR} = \frac{I}{\Delta Y}$$

Dimana :

I = investasi

ΔY = perubahan output

Pada kenyataannya pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (ceteris paribus).

Dalam penghitungan ICOR digunakan konsep nilai tambah bruto, bukan output. Bila model dasar tersebut diterapkan pada data deret waktu (time series), maka untuk memperoleh suatu nilai ICOR yang mewakili dilakukan penghitungan rata-rata sederhana. Model dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\mathbf{ICOR^{*}t = 1/n \; \Sigma \; It \; / \; (Yt\text{-}Yt\text{-}l)} \qquad \ldots \textbf{ Model 1}$$

Arti dari Model 1 di atas adalah investasi yang ditanamkan pada tahun t (It) menghasilkan output pada tahun t (Yt). Tambahan output tahun t tersebut sepenuhnya adalah hasil dari penanaman investasi pada tahun t. ICOR*t biasa disebut ICOR tanpa lag (lag 0).

Dalam perhitungan model 1 tersebut dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut :

$$\mathbf{ICOR^{*}t = 1/n \; \Sigma \; (0{,}1.It\text{-}1 + 0{,}9It) \; / \; (Yt\text{-}Yt\text{-}l)}$$

Dalam kenyataan investasi yang ditanamkan pada suatu tahun memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan output yang diinginkan. Oleh karena itu Model 1 dapat dimodifikasi menjadi :

$ICOR^{1}t = 1/n \Sigma It/ (Yt+1-Yt)$ … **Model 2**

Model 2 diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun t baru menghasilkan output satu tahun kemudian (t+1). Tambahan output pada tahun t+1 sepenuhnya merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada tahun t.

Selanjutnya juga dapat dimodifikasi menjadi. $ICOR^{1}t$ biasa disebut sebagai ICOR dengan lag-1.

Dalam perhitungan model 2 tersebut dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut :

$ICOR^{1}t = 1/n \Sigma (0,1It-1+0,9It) / (Yt+1-Yt)$

Model 3 diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun t baru menghasilkan output satu tahun kemudian (t+2). Tambahan output pada tahun t+2 sepenuhnya merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada tahun t.

$ICOR^{2}t$ biasa disebut ICOR dengan lag-2.

$ICOR^{2}t = 1/n \Sigma It/ (Yt+2-Yt+l)$ … **Model 3**

Dalam perhitungan model 3 tersebut dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut :

$ICOR^{2}t = 1/n \Sigma (0,1It-1+0,9It) / (Yt+2-Yt+l)$

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa penghitungan ICOR menggunakan prinsip rata-rata sederhana. Sebagai pembanding disajikan pula penghitungan ICOR dengan model Akumulasi

investasi yang pada dasarnya menerapkan prinsip rata-rata tertimbang.

$$ICOR = \frac{{}_{t=m}\Sigma^{t=n}(0{,}1I_{t-1} + 0{,}9I_t)}{{}_{t=m}\Sigma^{t=n}\ Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan :

It = Investasi atau penambahan kapasitas pada tahun ke-t
Yt = Output pada tahun ke t
Yt-1 = Output pada tahun ke t-1
m = Periode awal penghitungan
n = Periode akhir penghitungan

Dalam pendekatan model akumulasi investasi ini total investasi sepanjang periode referensi (t=m s/d t=n) dijumlahkan kemudian dibagi dengan penambahan output pada periode yang sama.

Kelebihan model akumulasi investasi dibanding model dasar adalah pada penggunaan prinsip rata-rata tertimbang. Dengan model standar yang dilakukan adalah membagi investasi pada tahun t1 s/d tn dengan tambahan output pada periode terkait kemudian merata-ratakan hasil bagi tersebut selama n tahun, jadi menggunakan rata-rata sederhana. Dengan rata-rata tertimbang akan dapat dihindari fluktuasi yang sangat ekstrim. Jadi rata-rata sederhana dapat terpengaruh dan bias.

Namun demikian metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu dapat mencerminkan inefisiensi yang memang terjadi dalam praktek. Metode ini memungkinkan diperhitungkannya kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak termanfaatkan secara penuh atau idle capacity.

Untuk mendapatkan satu nilai ICOR yang mewakili satu sektor ekonomi dalam satu periode dipilih satu diantara model-

model tersebut dengan mengkaji sektor yang bersangkutan guna memperkirakan selang waktu yang diperlukan sebelum suatu investasi dapat menghasilkan output.

2.2.2 Pengertian Investasi

Dalam konsep ilmu ekonomi, investasi merupakan tambahan terhadap stok kapital. Pengertian kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan peralatan serta lainnya .Dalam sistem pembukuan neraca perusahaan, yang dimaksud kapital adalah harta tetap (fixed assets) suatu badan usaha. Secara umum kapital sering disebut sebagai Gross Capital Stocks merupakan akumulasi/penumpukan pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produk baru.

Berdasarkan konsep ekonomi mikro, penambahan asset perusahaan untuk meningkatkan skala operasi diartikan sebagai investasi. Asset yang dimaksud mencakup asset seperti bangunan, mesin, peralatan, dan sejenisnya dan asset lancar seperti uang serta asset lain yang dapat segera diuangkan. Sedangkan dalam konsep ekonomi makro, investasi dapat diartikan sebagai penambahan fisik atas barang-barang modal tetap dan perubahan stok (sesuai konsep penghitungan produk Domestik Bruto/PDB atau PDRB.

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Sehingga dengan peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat

mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh United Nations (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional yang disebut System of *National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) plus perubahan *inventori/stok*. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti : bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan *inventori*/stok meliputi *output* setengah jadi, atau *input* yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan *inventori* merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Sebagaimana dijelaskan dalam System of National Accounts (SNA) Investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) identik dengan besarnya investasi fisik (real investment) yang direalisasikan di suatu Negara/wilayah pada suatu waktu tertentu (physical domestic investment). Disebut PMTB karena di dalamnya tidak termasuk perubahan stok (inventori). Sedangkan yang disebut sebagai pembentukan Modal Bruto (PMB) adalah bahwa apabila didalamnya termasuk perubahan stok/inventori. Selanjutnya dalam tulisan ini akan lebih difokuskan pada komponen PMTB.

Investasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat

berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Adapun penekanan investasi di sini lebih kepada investasi yang berupa fisik.

Dalam penghitungan ICOR, konsep investasi yang digunakan mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi yang dimaksud di sini adalah pembentukan barang modal tetap (fixed capital formation) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup:

a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
d. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Secara konseptual, PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran untuk pengadaan barang modal yang meliputi: pembuatan sendiri, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, setelah dikurangi barang modal yang dijual atau yang diberikan kepada pihak lain. Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih (disebut sebagai barang modal tetap; sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi dengan penyusutan barang modal).

Secara lebih rinci PMTB pada dasarnya meliputi:

a. Pembentukan modal berupa bangunan, mesin, angkutan dan perlengkapannya yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
b. Perbaikan besar, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan barang modal untuk meningkatkan mutu barang modal tersebut atau menambah umur pakai barang modal.
c. Biaya untuk pengembangan atau perbaikan lahan, penanaman kembali hutan, perluasan daerah pertambangan, penanaman dan peremajaan tanaman keras.
d. Pembelian ternak untuk pembiakan, pemerahan susu, atau sebagai alat angkutan, tetapi tidak termasuk ternak potong untuk konsumsi.
e. Margin perdagangan dan ongkos-ongkos yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah, hak paten, hak cipta, dan sebagainya.

2.2.3.1 Klasifikasi PMTB

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. PMTB menurut jenis barang modal,
b. PMTB menurut lapangan usaha/sektor,
c. PMTB menurut institusi.

2.2.3.2 PMTB Menurut Jenis Barang Modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

a. Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.

b. Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
c. Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya. [Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (durable goods).
d. Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

2.2.3.3 PMTB Menurut Lapangan Usaha/Sektor

PMTB menurut lapangan usaha/sektor adalah:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;

11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estate;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Jasa lainnya.

2.2.3.4 PMTB Menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

a. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan general administration, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai administration, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
b. Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
c. Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai

bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.2.4 Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan "keluaran" atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

a. Barang-barang yang dihasilkan.
b. Tenaga listrik yang dijual.
c. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan (flow) produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor

produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.2.5 Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi.

Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

BAB III

METODE KAJIAN

Model dasar yang digunakan untuk menentukan besaran ICOR agregat Kabupaten/Kota adalah persamaan ICOR dan diestimasi dengan metode deskriptif. Bab ini terdiri dari 3 pokok bahasan yaitu: (1). Data dan sumber data; (2). Estimasi PMTB menurut lapangan usaha; dan (3) Metode Penghitungan ICOR.

3.1. Data dan Sumber Data

3.1.1. Data dan Sampel

Sesuai dengan konsep dan teori ICOR, nilai ICOR adalah membandingkan antara perubahan kapital (investasi) dan perubahan output. Dalam studi ini, data yang digunakan untuk mengukur investasi adalah data Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) yaitu keseluruhan investasi masyarakat baik formal maupun informal. Sementara itu, untuk mengukur besarnya perubahan output yang dihasilkan oleh masyarakat secara keseluruhan adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB).

Untuk ICOR Agregat Kabupaten/Kota, data PDRB yang digunakan adalah data atas dasar harga tetap (PDRB ADHK) tahun dasar 2010. Pengambilan PDRB ADHK bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam nilai PDRB, sehingga PDRB dan PMTB yang dianalisis adalah PDRB dab PMTB riil. Atas dasar hal ini, maka ICOR yang diperoleh mencerminkan porsi investasi yang sesungguhnya, tidak bias atas pengaruh investasi. Dalam hal PMTB, data resmi yang dikeluarkan BPS sampai dengan tahun 2021 hanyalah PMTB agregat Kabupaten.

3.1.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dengan sumber utama data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, ada beberapa data lain yang digunakan untuk memperkuat analisis, terutama memperkaya interpretasi hasil perhitungan ICOR, baik agregat maupun sektoral. Datadata tersebut bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2. Estimasi PMTB Menurut Lapangan Usaha

PMTB dihitung atas dasar harga konstan 2010 karena pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan PMTB menurut lapangan usaha menggunakan metode alokasi. Sebagai alokator adalah nilai penyusutan masing-masing sektor yang diperoleh pada penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan total investasi dihitung dari jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori. Nilai penyusutan digunakan sebagai alokator berdasarkan pada pemikiran bahwa penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun tertentu akan dipakai untuk investasi pada tahun itu juga. Ini berarti bahwa investasi mempunyai hubungan linier dengan nilai penyusutan sehingga lapangan usaha yang mempunyai nilai penyusutan besar akan memiliki investasi yang besar pula.

Oleh karena tidak diperoleh data PMTB secara sektoral, maka diestimasi dengan menggunakan data ICOR sektoral yang dipublikasikan BPS Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 s/d 2021. Selanjutnya untuk tahun 2021 nilai PMTB diestimasi berdasarkan nilai PMTB tahun-tahun sebelumnya. Metode estimasi yang digunakan meliputi: metode indeks rantai dengan asumsi pertumbuhan tetap; metode moving average dengan asumsi

perubahan tetap; dan metode trend linier. Sementara penghitungan Pertambahan Output Menurut Lapangan Usaha Penghitungan pertambahan output (ΔY) didekati dengan pertambahan Nilai Tambah Bruto (ΔNTB) menurut lapangan usaha.

3.3. Metode Penghitungan ICOR

Penghitungan ICOR menggunakan dua metode, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Untuk tujuan keterbandingan, pendekatan investasi menggunakan dua cara, yaitu investasi sama dengan PMTB dengan dan tanpa memperhitungkan Perubahan Inventori. Penghitungan ICOR dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

3.3.1. Metode

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung besaran ICOR adalah:

ICOR = □K/ □ Y.....… (3.1)

Keterangan:

ΔK = Investasi atau penambahan barang modal baru/kapasitas

ΔY = Penambahan output untuk penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan ΔK = I (investasi),

Rumus (3.1) dapat dimodifikasi menjadi:

ICOR=1/□Y…… (3.2)

Rumus (3.2) ini disebut dengan Gross ICOR, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang

diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus Gross ICOR ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap. Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (3.2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

ICOR = It/(Yt – Yt-1) ..... (3.3)

Keterangan:

It = Investasi pada tahun ke-t

Yt = Output pada tahun ke-t

Yt-1 = Output pada tahun ke-1

Rumus (3.3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga. Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t1 sampai tn, sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t1 s.d tn) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t1 s.d tn dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t1 sampai dengan tn. Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$ICOR = 1/n \Sigma\ It/(Yt - Yt - 1)$ ..... (3.4)

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun

tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain, yaitu mampu mencerminkan inefisiensi investasi yang sering terjadi dalam praktek.

3.3.2. Time Lag Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut time lag, selanjutnya hanya akan dituliskan lag saja. Jika investasi yang ditanam pada tahun ke-t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (3.4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor time lagdapat dimodifikasi menjadi:

$ICOR = i/n \Sigma (It/(Yt - Yt-1)$

Dimana:

Time lag = 0, 1, 2, 3, 4, ... dst

s = Lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

3.3.3. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alas an tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi output

yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi inefficiency. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

3.3.4. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga relative kurang efisien.

BAB IV

Incremental Capital Output Rasio (ICOR) Kabupaten Sidoarjo

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/ modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital (investasi) terhadap penambahan sejumlah output (pendapatan). Kapital diartikan sebagai barang fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran (pendapatan) dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter nilai tambah.

Bab ini menjelaskan tentang kegiatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya struktur perekonomian berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi Pendapatan Tetap Modal Bruto (PMTB) perhitungan *Incremental Capital Output Rasio* (ICOR) dan Analisa *Incremental Capital Output Rasio* (ICOR).

4.1 Perekonomian Kabupaten Sidoarjo

Perkembangan ekonomi adalah suatu kondisi meningkatnya pendapatan yang disebabkan adanya peningkatan terhadap produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan ini tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan bisa dilihat dari *output* yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi dalam bidang sosial. Dengan kata lain perkembangan ekonomi merupakan adanya perubahan dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan variabel yang dapat mengukur perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo:

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Terdapat dua jenis PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB adalah data yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHK adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun acuan). PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo dapat diperhatikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2021 (Milliar Rupiah)

	2017	2018	2019	2020	2021
ADHB	174.180,09	189.256,01	204.201,62	197.240,69	210.643,89
ADHK	125.039,06	132.552,94	140.492,94	135.305,32	141.000,36

* angka sementara ** angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tahun 2017 PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 174.180,09 milliar naik menjadi sebesar Rp 204.201,62 milliar di tahun 2019. PDRB ADHB mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan sebesar Rp 6.960,93 milliar menjadikan PDRB ADHB tahun 2020 (Rp 197.240,69 milliar) lebih kecil dari tahun 2019 (Rp 204.201,62 milliar). Nilai PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan Kembali di tahun 2021 sebesar Rp 210.643.89 milliar.

Kondisi yang terjadi pada PDRB ADHB sama halnya dengan perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2017 nilai PDRB ADHK sebesar Rp 125.039,06 milliar mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga tahun 2019 menjadi Rp 140.492,94 milliar. Tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi Rp 135.305,32 milliar dan naik kembali di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 141.000,36 milliar. Terkait kenaikan dan penurunan PDRB dapat diperhatikan pada Gambar 4.1.

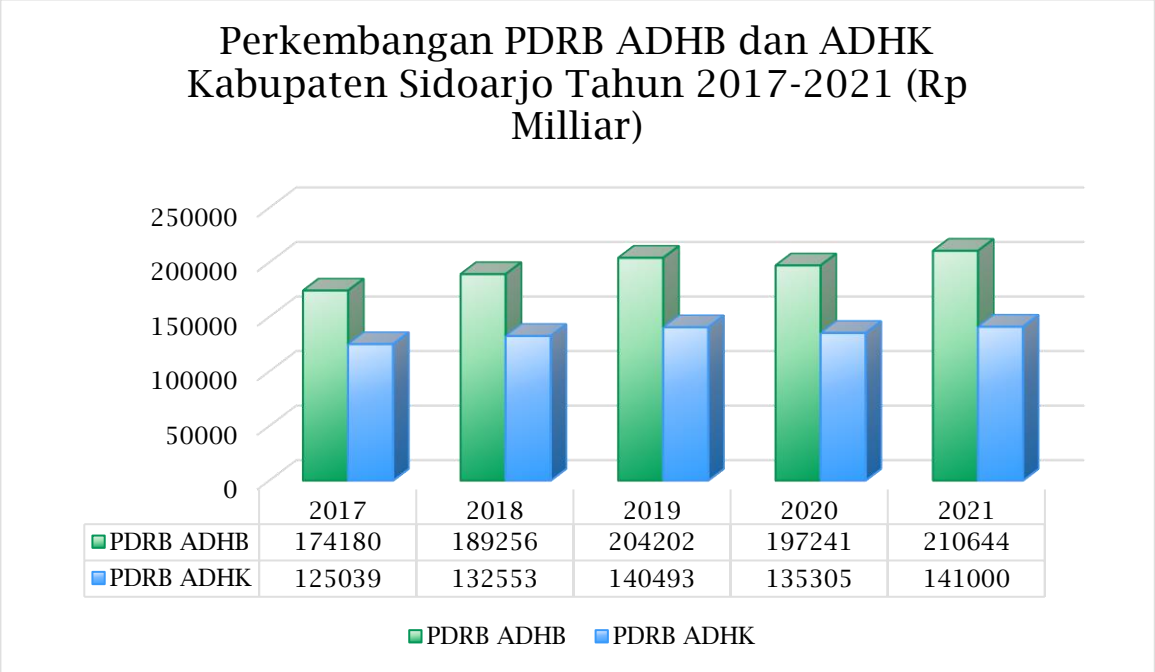

Gambar 4.1: Grafik PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2021

Gambar 4.1 menjelaskan bahwa nilai PDRB ADHB lebih besar daripada nilai PDRB ADHK. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, keduanya mengalami penurunan di tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021. Jumlah PDRB ADHB dan PDRB ADHK tertinggi terjadi di tahun 2021 dan terkecil di tahun 2017. Hal tersebut menjadikan meskipun PDRB ADHK dan PDRB ADHB di tahun 2020 mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya (2019) namun jumlah PDRB terkecil terjadi pada tahun 2017.

Selama kurun waktu 5 tahun terdapat goncangan akibat kondisi tertentu yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 mencapai 5% dan jatuh di tahun 2020 yang tercatat negatif yaitu -2,1%. Kondisi tersebut tidak terkecuali pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mencapai -2,39% dan Kabupaten Sidoarjo -3,69% di tahun 2020. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi berjalan ke arah positif, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional mencapai 3,7%, Jawa Timur sebesar 3,57% dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,21%. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2017 hingga 2019. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional, provinsi dan daerah dapat diperhatikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 (persen)

	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	5,1	5,2	5,0	-2,1*	3,7 **
Jawa Timur	5,46	5,47	5,52	-2,39	3,57
Sidoarjo	5,80	6,01	5,99	-3,69	4,21

Sumber: BPS, 2022; BPS Jawa Timur, 2022; BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Tabel 4.2 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional. Secara Nasional pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, dari 5,0% menjadi -2,1% (2020). Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan secara

signifikan dengan nilai 3,7%. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo. Terkait tren pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi dan Kabupaten dapat diperhatikan pada Gambar 4.2.

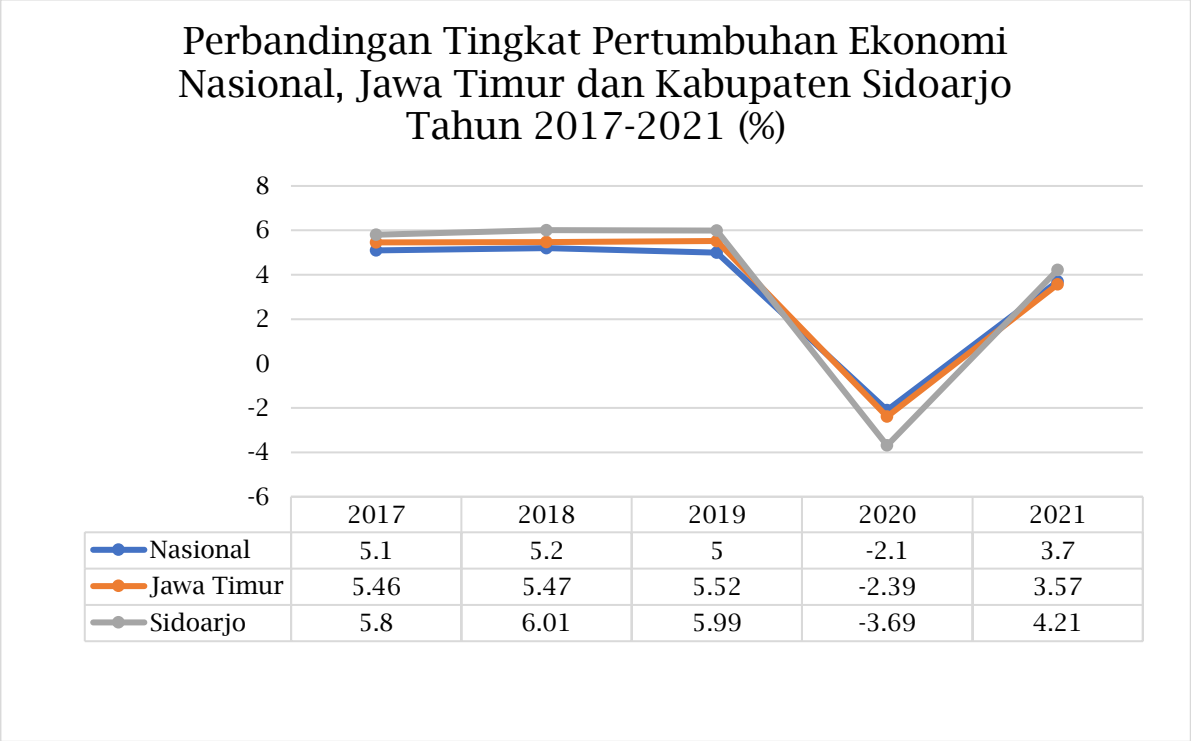

	2017	2018	2019	2020	2021
Nasional	5.1	5.2	5	-2.1	3.7
Jawa Timur	5.46	5.47	5.52	-2.39	3.57
Sidoarjo	5.8	6.01	5.99	-3.69	4.21

Gambar 4.2: LajuTingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 (persen)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi secara nasional, provinsi dan Kabupaten Sidoarjo pernah mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu di tahun 2020. Jika dibandingkan secara nasional dan provinsi, kabupaten Sidoarjo yang mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar -3,69%. Namun Kabupaten Sidoarjo juga mengalami peningkatan secara tajam di tahun 2021 (4,21%), jika dibandingkan dengan peningkatan secara nasional dan Jawa Timur. Terdapat pula perbandingan antar kabupaten/kota sekitar Kabupaten Sidoarjo seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya (Gerbangkertosusilo) Tahun 2017-2021 (persen)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Gresik	5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79
Bangkalan	3,53	4,22	1,03	-5,59	-2,07
Mojokerto	5,73	5,88	5,81	-1,11	4,12
Sidoarjo	5,80	6,01	5,99	-3,69	4,21
Lamongan	5,50	5,44	5,43	-2,65	3,43
Kota Mojokerto	5,65	5,80	5,65	-3,69	3,65
Kota Surabaya	6,13	6,19	6,09	-4,85	4,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2022)

Dari 7 wilayah yang telah disebutkan dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebelum tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berada di angka positif. Kabupaten Sidoarjo memiliki pertumbuhan yang bagus setelah Kota Surabaya (6,09%) yaitu 5,99%. Wilayah lainnya yang pertumbuhan ekonomi masih rendah adalah Bangkalan (1,03%). Pada tahun 2020, seluruh daerah teracatat mengalami pertumbuhan negatif. Kabupaten Bangkalan mengalami goncangan ekonomi yang paling mendalam yaitu sebesar -5,59%. Kemudian disusul Kota Surabaya dengan pertumbuhan -4,85%. Kabupaten Sidoarjo pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,69%. Nilai persentase pertumbuhan di tahun 2020 memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto.

Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi semua daerah Gerbangkertosusilo menunjukkan perkembangan dengan angka positif. Terdapat satu kabupaten yang masih berada di area

negative yaitu Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Sidoarjo sendiri berada pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sebesar 4,21% setelah Kota Surabaya 4,29%. Tren pertumbuhan yang masuk pada daerah Gerbangkertosusilo dapat diperhatikan pada Gambar 4.3.

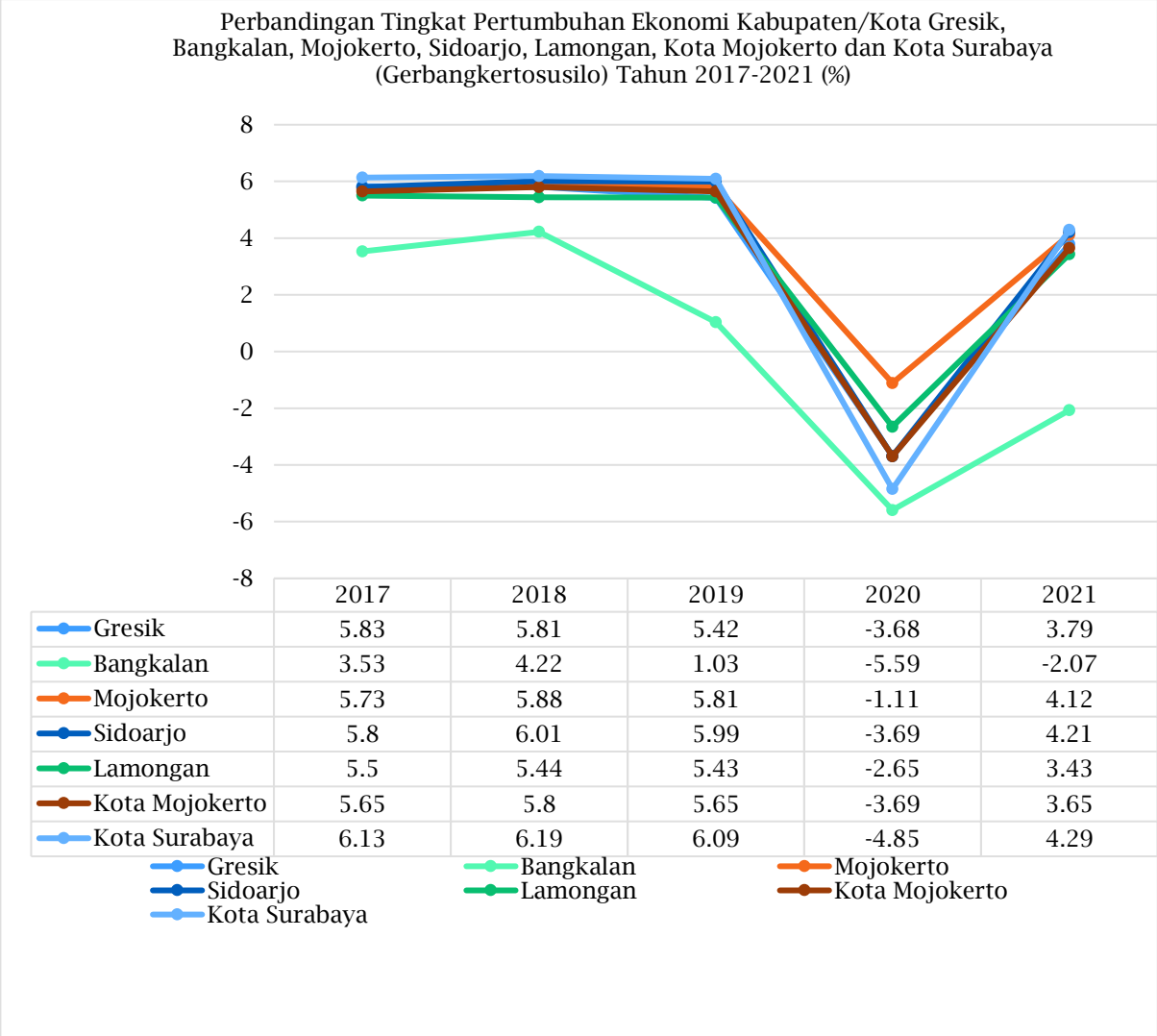

	2017	2018	2019	2020	2021
Gresik	5.83	5.81	5.42	-3.68	3.79
Bangkalan	3.53	4.22	1.03	-5.59	-2.07
Mojokerto	5.73	5.88	5.81	-1.11	4.12
Sidoarjo	5.8	6.01	5.99	-3.69	4.21
Lamongan	5.5	5.44	5.43	-2.65	3.43
Kota Mojokerto	5.65	5.8	5.65	-3.69	3.65
Kota Surabaya	6.13	6.19	6.09	-4.85	4.29

Gambar 4.3: Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya (Gerbangkertosusilo) Tahun 2017-2021 (persen)

Gambar 4.3 menjelaskan bahwa 7 wilayah di tahun 2017 hingga 2019 berada pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung

stagnan dengan sedikit kontraksi pada wilayah tertentu. Pada tahun 2020 semua wilayah Gerbangkertosusilo kompak dengan grafik yang menurun tajam. Bangkalan menjadi kabupaten yang paling terperosok pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada tahun 2021, semua wilayah bergerak maju atau meningkat ke area positif dan hanya meninggalkan Kabupaten Bangkalan pada area yang masih negatif. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo bergerak mengikuti pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

4.1.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 17 jenis sektor lapangan usaha. Tujuh belas sektor tersebut diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 hingga tahun 2018 dapat diperhatikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo 2017–2021

Kode	Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.055,64	4.104,56	4.217,104	4.431,85	4.478,98
B	Pertambangan dan Penggalian	159,92	188,90	189,22	123,90	134,92
C	Industri Pengolahan	80.314,62	88.415,20	97.732,91	100.918,68	109.461,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.798,01	1.725,65	1.743,11	1.666,70	1.784,97
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	112,91	118,58	121,88	129,32	139,82
F	Konstruksi	16.006,57	17.134,29	17.732,85	17.121,36	16.070,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.039,69	30.735,87	33.259,50	31.599,83	35.456,16
H	Transportasi dan Pergudangan	21.275,28	22.659,53	22.949,04	14.604,92	15.037,48

Kode	Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.013,35	6.500,53	7.119,47	6.733,72	7.469,71
J	Informasi dan Komunikasi	6.094,64	6.467,92	7.064,81	7.618,70	7.997,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.183,94	2.337,09	2.453,81	2.451,70	2.550,76
L	Real estat	1.564,21	1.728,34	1.873,33	1.958,76	1.994,61
M, N	Jasa Perusahaan	275,39	306,15	333,41	316,76	327,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.113,76	3.438,19	3.721,59	3.798,25	3.881,62
P	Jasa Pendidikan	2.024,85	2.163,66	2.361,35	2.471,63	2.479,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	533,99	568,78	616,03	679,76	729,41
R, S, T, U	Jasa Lainnya	613,33	662,78	712,21	614,83	648,64

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 total PDRB ADHB

mengalami penurunan dari Rp 204.201,62 Miliar menjadi Rp 197.240,69 Miliar. Beberapa kategori mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19, seperti Pertambangan dan Penggalian yang sebelumnya Rp 189,22 Miliar menjadi Rp 123,90 Miliar; Pengadaan Listrik dan Gas Rp 1.743,11 Miliar menjadi Rp 1.666,70 Miliar; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp 33.259,50 Miliar menjadi Rp 31.599,83 Miliar; Transportasi dan Pergudangan Rp 22.949,04 Miliar menjadi Rp 14.604,92 Miliar; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp 7.119,47 menjadi Rp 6.733,72 Miliar; Jasa Keuangan dan Asuransi Rp 2.453,81 Miliar menjadi Rp 2.451,70 Miliar; Jasa Perusahaan Rp 333,41 Miliar menjadi Rp 316,76 Miliar; dan Jasa Lainnya Rp 712,21 Miliar menjadi Rp 614,83 Miliar. Pada tahun 2021 hanya kategori Kontruksi yang mengalami penurunan dari Rp 17.121,36 Miliar menjadi Rp 16.070,90 Miliar. Sedangkan terkait laju pertumbuhannya dapat diperhatikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2021

Kode	Kategori	Tahun				Rata
		2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,21	2,74	5,10	1,10	2,53
B	Pertambangan dan Penggalian	18,12	0,17	-34,52	8,90	-1,83
C	Industri Pengolahan	10,10	10,54	3,26	8,50	8,1
D	Pengadaan	-4,02	1,01	-4,40	7,10	2,12

Kode	Kategori	Tahun				Rata
		2018	2019	2020	2021	
	Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	5,02	2,80	6,10	8,12	5,51
F	Konstruksi	7,05	3,50	-3,45	-6,14	0,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,62	8,21	-5,00	12,20	6,25
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	1,30	-36,36	2,96	-6,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,10	9,52	-5,42	10,93	5,78
J	Informasi dan Komunikasi	6,12	9,23	7,84	4,98	7,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,01	5,00	-0,09	4,04	3,99
L	Real estat	10,50	8,40	4,56	1,83	6,32
M, N	Jasa Perusahaan	11,17	8,90	-5,00	3,27	4,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,42	8,24	2,06	2,20	5,73
P	Jasa Pendidikan	6,86	9,14	4,67	0,31	5,24

Kode	Kategori	Tahun				Rata
		2018	2019	2020	2021	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	6,52	8,31	10,35	7,30	8,12
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,06	7,46	-13,67	5,50	1,83

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB ADHB mengalami penurunan dari 7,90% menjadi -3,41%. Beberapa kategori mengalami penurunan akibat dari pandemi covid-19, seperti Pertambangan dan Penggalian yang sebelumnya 0,17% menjadi -34,52%; Pengadaan Listrik dan Gas 1,01% menjadi -4,40; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,21% menjadi -5%; Transportasi dan Pergudangan 1,30% menjadi -36,36%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,52% menjadi -5,42%; Jasa Keuangan dan Asuransi 5% menjadi -0,09%; Jasa Perusahaan 8,90% menjadi -5%; dan Jasa Lainnya 7,46% menjadi -13,67%. Pada tahun 2021 hanya kategori Kontruksi yang mengalami penurunan dari -3,45% menjadi -6,14%.

Rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2018 hingga 2021 yaitu 4,98%. Rata-rata tertinggi dicapai oleh kategori jasa kesehatan dan kegiatan 8,12%, kemudian pada posisi kedua dan ketiga diikuti Industri Pengolahan 8,1%; dan Informasi dan Komunikasi 7,043%. Rata-rata terendah yaitu pada kategori Transportasi dan Pergudangan -6,398%; Pertambangan dan Penggalian -1.833; dan

Kontruksi 0,24%. Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo dapat diperhatikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha yang terjadi di tahun 2017-2021

Kode	Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.654,51	2.551,74	2.558,27	2.628,50	2.626,37
B	Pertambangan dan Penggalian	151,05	154,19	156,80	110,22	101,68
C	Industri Pengolahan	61.596,91	65.974,67	71.841,26	72.546,48	76.097,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.148,32	1.074,40	1.066,00	1.018,39	1.078,33
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	96,74	100,73	105,34	110,15	117,09
F	Konstruksi	11.538,53	12.240,07	12.962,68	12.221,16	11.386,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.271,72	21.429,48	22.703,38	20.734,15	22.721,41
H	Transportasi dan Pergudangan	10.401,34	10.853,00	9.721,50	6.469,62	6.672,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.344,22	4.649,76	5.008,87	4.653,71	4.922,01

Kode	Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	5.494,45	5.826,31	6.265,62	6.739,92	7.070,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.490,05	1.552,62	1.614,03	1.604,28	1.614,91
L	Real estat	1.198,69	1.271,81	1.348,25	1.385,90	1.406,46
M, N	Jasa Perusahaan	197,61	210,90	224,06	207,84	211,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.118,37	2.205,65	2.289,68	2.242,46	2.298,30
P	Jasa Pendidikan	1.451,23	1.525,10	1.637,65	1.685,81	1.693,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	407,27	432,80	458,99	497,07	519,60
R, S, T, U	Jasa Lainnya	478,06	499,72	530,55	449,64	462,02

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 total PDRB ADHK mengalami penurunan dari Rp 140.492,94 Miliar menjadi Rp 135.305,32 Miliar. Beberapa kategori mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19, seperti Pertambangan dan Penggalian yang sebelumnya Rp 156,80 Miliar menjadi Rp 110,22 Miliar; Pengadaan Listrik dan Gas Rp 1.066,00 Miliar menjadi Rp 1.018,39 Miliar; Kontruksi Rp 12.962,68 Miliar menjadi Rp 12.221,16 Miliar; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp 22.703,38 Miliar menjadi Rp 20.734,15 Miliar; Transportasi dan Pergudangan Rp 9.721,50 Miliar menjadi Rp 6.469,62 Miliar; Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum Rp 5.008,87 Miliar menjadi Rp 4.653,71 Miliar; Jasa Keuangan dan Asuransi Rp 1.614,03 Miliar menjadi Rp 1.604,28 Miliar; Jasa Perusahaan Rp 224,06 Miliar menjadi Rp 207,84 Miliar; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Rp 2.289,68 Miliar menjadi Rp 2.242,46 Miliar; dan Jasa Lainnya Rp 530,55 Miliar menjadi Rp 449,64 Miliar.

Pada tahun 2021 hanya dua kategori usaha yang mengalami penurunan, yaitu Pertambangan dan Penggalian Rp 110,22 Miliar menjadi Rp 101,68 Miliar; dan Kontruksi Rp 12.221,16 Miliar menjadi Rp 11.386,68 Miliar. Terkait laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Sidoarjo dapat diperhatikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada kategori-kategori lainnya yang terjadi di tahun 2018-2019 (persen)

Kode	Kategori	Tahun				Rata
		2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.87	0.26	2.75	-0.08	-0.235
B	Pertambangan dan Penggalian	2.08	1.69	-29.71	-7.75	-8.4225
C	Industri Pengolahan	7.12	8.88	0.98	4.90	5.47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6.44	-0.78	-4.47	5.89	-1.45
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	4.12	4.58	4.57	6.30	4.8925

Kode	Kategori	Tahun				Rata
		2018	2019	2020	2021	
F	Konstruksi	6.08	5.90	-5.72	-6.83	-0.1425
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.76	5.98	-8.67	9.58	3.1625
H	Transportasi dan Pergudangan	4.34	-10.43	-33.45	3.14	-9.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.04	7.72	-7.09	5.77	3.36
J	Informasi dan Komunikasi	6.04	7.54	7.57	4.9	6.5125
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.20	3.96	-0.6	0.66	2.055
L	Real estat	6.10	6.01	2.79	1.48	4.095
M, N	Jasa Perusahaan	6.73	6.24	-7.24	1.54	1.8175
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.12	3.81	-2.06	2.49	2.09
P	Jasa Pendidikan	5.09	7.38	2.94	0.45	3.965
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	6.27	6.05	8.30	4.53	6.2875
R, S, T, U	Jasa Lainnya	4.53	6.17	-15.25	2.75	-0.45

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) menurut lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan 0,03% dari 6,02% menjadi 5,99%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB ADHK mengalami penurunan tajam dari 5,99% menjadi -3,69%. Beberapa kategori mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19, seperti Pertambangan dan Penggalian yang sebelumnya 1,69% menjadi -29,71%; Industri Pengolahan 8.88% menjadi 0.98%; Pengadaan Listrik dan Gas -0,78% menjadi -4,47; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang 4,58% menjadi 4,57%; Kontruksi 5,90% menjadi -5,72%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,98% menjadi -8,67%; Transportasi dan Pergudangan -10,43% menjadi -33,45%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,72% menjadi -7,09%; Jasa Keuangan dan Asuransi 3,96% menjadi -0,6%; Real estat 6,01% menjadi 2,79%; Jasa Perusahaan 6,24% menjadi -7,24%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 3,81% menjadi -2,06%; Jasa Pendidikan 7.38% menjadi 2.94% dan Jasa Lainnya 6,17% menjadi -15,25%. Pada tahun 2021 hanya enam kategori yang mengalami penurunan, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari 2,75% menjadi -0,08%; Kontruksi -5.72% menjadi -6.83%; Informasi dan Komunikasi 7.57% menjadi 4.9%; Real estat 2.79% menjadi 1.48%; Jasa pendidikan 2.94% menjadi 0.45%; dan Jasa kesehatan dan kegiatan 8.30% menjadi 4.53%.

Rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) tahun 2018 hingga 2021 yaitu 3,1325%. Rata-rata tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi 6,51%, kemudian pada posisi kedua dan ketiga diikuti jasa kesehatan dan kegiatan 6,29%, dan Industri Pengolahan 5,47%. Rata-rata terendah yaitu pada kategori

Transportasi dan Pergudangan -9,1%; Pertambangan dan Penggalian -8.42; dan Pengadaan Listrik dan Gas -1,45%.

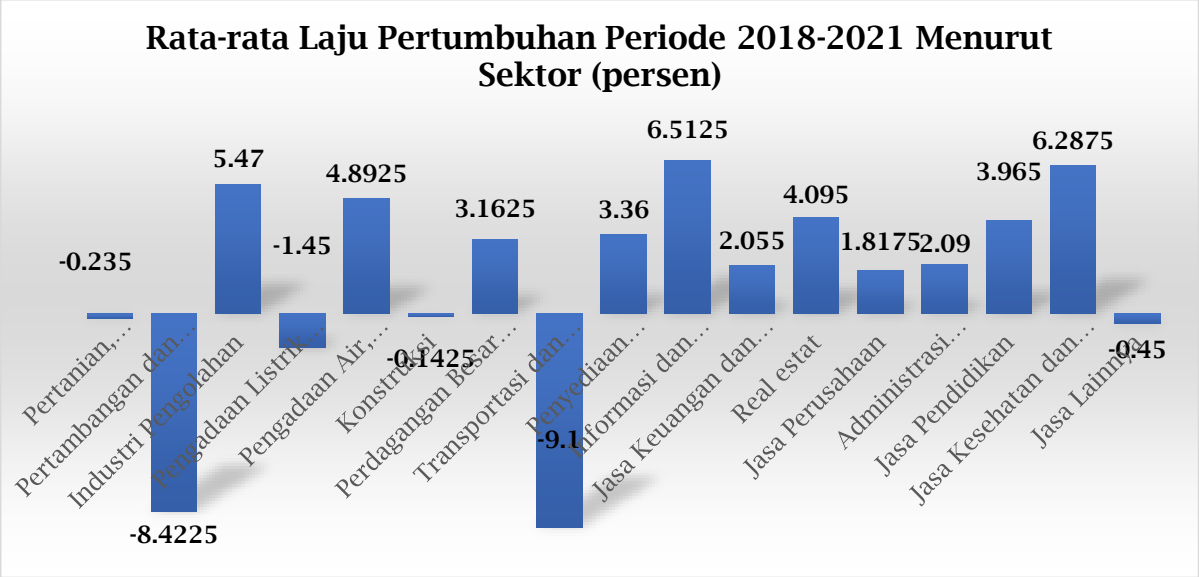

Gambar 4.4. Rata-rata Laju Pertumbuhan Periode 2018-2021 Menurut Sektor (persen)

4.1.3 Struktur Investasi Menurut Sektor

Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi paling besar bagi PDRB Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar 51,97%. Selain itu, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 16,83% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Kemudian disusul dengan Sektor Konstruksi memberi kontribusi sebesar 7,63%. Sektor Transportasi dan Pergudangan menyumbang 7,14% terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Sektor Informasi dan Komunikasi menyumbang sebesar 3,80% terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo 2021. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,55%. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 3%.

Pertanian 2,13%; Administrasi 1,84% Asuransi 1,21%; pendidikan 1,18%; estate 0,95%; listrik 0,85%; jasa kesehatan 0,35%; jasa lainnya 0,31%; perusahaan 0,16%; pengadaan air 0,07%; dan pertambagan 0,06%.

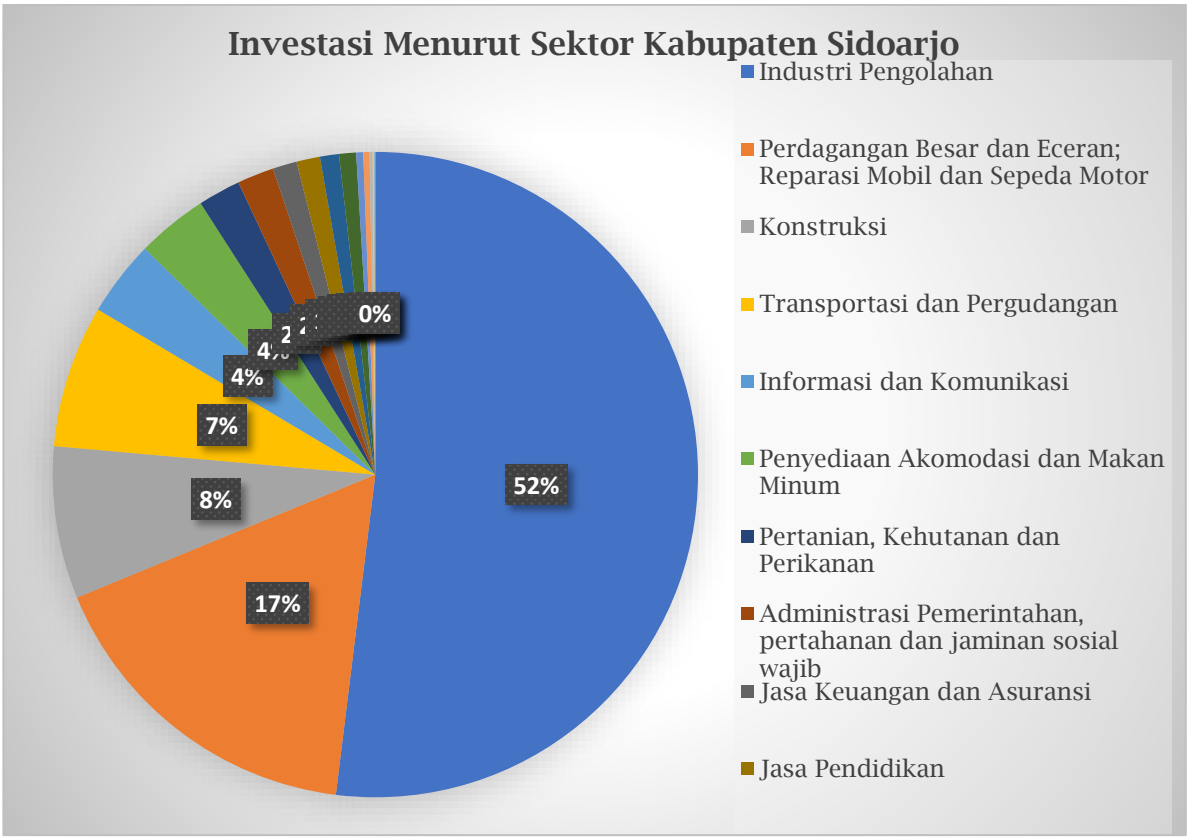

Gambar 4.5. Struktur Investasi Menurut Sektor Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

1. Investasi di Sektor Industri Pengolahan

Kegiatan usaha yang termasuk kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industry

pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Yang termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan dan kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Telah diuraikan sebelumnya bahwa sektor industri pengolahan adalah sektor yang mempunyai nilai investasi terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa industri pengolahan skala besar berlokasi di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Buduran, Kecamatan Krian dan Kecamatan Waru. Sedangkan industri pengolahan skala kecil dan menengah tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.8: Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	80.314,6	-	61.596,9	-
2018	88.415,2	10,10%	65.982,7	7,12%
2019	97.732,91	10,54%	71.841,3	8,88%
2020	100.918,68	3,26%	72.546,48	0,98%
2021	109.461,90	8,50%	76.097,88	4,90%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Selama kurun waktu 2017-2021 investasi yang ditanamkan pada sektor industri pengolahan memiliki nilai positif. Artinya sektor industri pengolahan mengalami penambahan investasi. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, nilai investasi yang ditanamkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 80,3 Triliun dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga tahun 2021

mencapai Rp. 109,46 Triliun. Sedangkan menurut harga konstan 2010, investasi sektor industri pengolahan terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,88% persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,98%.

2. Investasi di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kegiatan usaha yang termasuk kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memegang peranan terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Tahun 2017, investasi yang ditanamkan pada sektor ini sebesar Rp 28 Triliun dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp 33,28 Triliun. Pada tahun 2020 nilai investasi yang ditanamkan

mengalami penurunan sebesar 5% menjadi Rp 31,59 Triliun. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian pada tahun 2020. Pada tahun 2021 investasi yang ditanamkan mengalami kenaikan signifikan sebesar 12,2% menjadi Rp 35,45 Triliun.

Jika dihitung atas dasar harga konstan 2010, nilai investasi yang ditanamkan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2021 mencapai Rp. 22,7 Triliun atau mengalami pertumbuhan tertinggi dari tahun sebelumnya sebesar 9,58%. Nilai investasi mengalami kontraksi pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,67%.

Tingginya nilai investasi khususnya pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bisa dilihat pula dari realita di lapangan yaitu makin maraknya pembangunan Mall-Mall dan pertokoan di Kabupaten Sidoarjo. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa makin banyak pengusaha yang memberikan kepercayaannya untuk mengembangkan sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo. Apalagi dari sisi konsumen, dimana di Kabupaten Sidoarjo tumbuh perumahan-perumahan yang merupakan wilayah hunian untuk memenuhi pekerja industri dan juga sebagai penyangga (*buffer*) Kota Surabaya. Hal ini merupakan pasar yang menarik bagi investor.

Tabel 4.9: Nilai Investasi Sektor Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	28.039,7	-	20.271,7	-
2018	30.752,8	9,62	21.439,5	5,76%
2019	33.281,2	8,21	22.721,5	5,98%
2020	31.599,83	-5,00	20.734,15	-8,67%
2021	35.456,16	12,20	22.721,41	9,58

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

3. Investasi di Sektor Transportasi dan Pergudangan

Kegiatan usaha yang termasuk kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir.

Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain. Nilai investasi yang ditanamkan investor di sektor

Transportasi dan Pergudangan tahun 2017 sebesar Rp 21,2 Triliun dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai Rp 22,95 Triliun. Pada tahun 2020 nilai investasi mengalami kontraksi sebesar 36,36% menjadi Rp 14,6 Triliun, kemudian tumbuh 2,96% di tahun 2021 menjadi Rp 15 Triliun.

Jika dihitung atas dasar harga konstan 2010, nilai investasi yang ditanamkan pada sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 10,43% dan tahun 2020 sebesar 33,45%. Kemudian tumbuh di tahun 2021 sebesar 3,14% menjadi Rp 6,6 Triliun.

Tabel 4.10: Nilai Investasi Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	21.275,3	-	10.401,3	-
2018	22.659,5	6,51%	10.853,0	4,34%
2019	22.949,0	1,30%	9.721,5	-10,43%
2020	14.604,92	-36,36%	6.469,62	-33,45%
2021	15.037,48	2,96%	6.672,86	3,14%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Menurut harga konstan 2010, nilai investasi di sektor angkutan dan pergudangan tahun 2018 sebesar Rp. 10,85 Triliun dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 10,42% menjadi Rp. 9,72 Triliun.

4. Investasi di Sektor Konstruksi

Kategori konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegitan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi dipakai sendiri. Berikut nilai investasi sektor Konstruksi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021.

Tabel 4.11: Nilai Investasi Sektor Konstruksi di Kabupaten Sidoarjo, 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	16.006,6	-	11.538,5	-
2018	17.134,3	7,05	12.240,1	6,08%
2019	17.732,8	3,50	12.962,7	5,9%
2020	17.121,36	-3,45	12.221,16	-5,72%
2021	16.070,90	-6,14	11.386,68	-6,83%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Semakin maraknya pembangunan sarana dan prasarana jalan, pemukiman penduduk, pabrik, pusat perbelanjaan, hotel, dll.

turut mendorong peningkatan di sektor konstruksi. Investasi di sektor konstruksi dipandang cukup menjanjikan sehingga banyak investor yang menanamkan investasinya pada sektor tersebut. Total nilai investasi yang ditanamkan pada sektor ini tahun 2017 sebesar Rp. 16 Triliun dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp. 17,73 Triliun. Investasi yang ditanamkan pada sektor ini mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut sebesar 3,45% pada tahun 2020 dan 6,14% pada tahun 2021.

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 nilai investasi di sektor konstruksi pada tahun 2017 sebesar Rp. 11,5 Triliun dan mengalami peningkatan yang signifikan per tahunnya hingga tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,08%. Nilai investasi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,72% dan 6,83%.

5. Investasi di Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kegiatan usaha yang termasuk kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tingga tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Besaran investasi menurut harga berlaku tahun 2017 sebesar Rp. 6 Triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 7,1 Triliun. Pada tahun 2020 investasi pada sektor ini mengalami kontraksi sebesar 5,42% menjadi Rp 6,7 Triliun. Tahun 2021 sektor ini mampu tumbuh kembali sebesar 10,93% mencapai Rp 7,4 Triliun.

Jika lihat berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 pertumbuhan investasi yang ditanamkan di sektor ini tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,72% mencapai Rp 5 Triliyn. Pada tahun 2020 investasi pada sektor ini mengalami kontraksi sebesar 7,09% menjadi Rp 4,6 Triliun. Pada tahun 2021 sektor ini mampu tumbuh sebesar 5,77% menjadi Rp 4,9 Triliun.

Tabel 4.12: Nilai Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	6.013,3	-	4.344,2	-
2018	6.500,8	8,10%	4.650,0	7,04%
2019	7.119,8	9,52%	5.009,1	7,72%
2020	6.733,72	-5,42%	4.653,71	-7,09%
2021	7.469,71	10,93%	4.922,01	5,77%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

6. Investasi di Sektor Informasi dan Komunikasi

Kegiatan usaha yang termasuk kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori ini terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan music, penyiaran dan pemrograman (radio dan televise), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi computer dan teknologi

informasi. Selama periode 2015-2019 investasi yang ditanamkan di sektor informasi dan komunikasi terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 investasi atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6 Triliun dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga 2021 menjadi Rp. 7,9 Triliun. Jika ditinjau berdasarkan investasi atas dasar harga konstan 2010, sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,57%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,9%. Dapat disimpulkan bahwa sektor ini ternyata tidak terpengaruh oleh pandemic covid-19.

Tabel 4.13: Nilai Investasi Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	6.094,6	-	5.494,4	-
2018	6.467,9	6,12	5.826,3	6,04%
2019	7.064,8	9,23	6.265,6	7,54%
2020	7.618,70	7,84	6.739,92	7.57%
2021	7.997,72	4,98	7.070,29	4,9%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

7. Investasi di Sektor Pertanian

Di tengah semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, tidaklah mudah untuk mempertahankan luasan lahan pertanian yang ada. Isu terjadinya alih fungsi lahan pertanian sudah digaungkan pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih serius menangani sektor pertanian sebagai upaya mempertahankan lahan penyangga pangan tersebut. Investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian relatif kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa alih fungsi lahan pertanian nyata terjadi, dalam arti investor enggan menanamkan modal di sektor pertanian karena sektor ini tidak terlalu menjanjikan keuntungan yang signifikan. Nilai investasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp. 4 Triliun dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 4,4 Triliun. Jika ditinjau atas dasar harga konstan 2010, nilai investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian mengalami kontraksi di tahun 2018 sebesar 3,87%. Sektor ini mengalami pertumbuhan pada 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 0,26% dan 2,75%. Pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,08%

Tabel 4.14: Nilai Investasi Sektor Pertanian di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	4.055,6	-	2.654,5	-
2018	4.104,6	1,21	2.551,7	-3,87%
2019	4.220	2,74	2.558,3	0,26%
2020	4.431,85	5,10	2.628,50	2,75%
2021	4.478,98	1,10	2.626,37	-0,08%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

8. Investasi di Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Selama 2017-2021 investasi yang ditanamkan di sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 nilai investasi atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 3,1 Triliun, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi Rp. 3,8 Triliun. Sedangkan jika dilihat dari atas dasar harga konstan, nilai investasi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 2,2 Triliun. Pertumbuhan tertinggi investasi atas dasar harga konstan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,12 persen. Pada tahun 2020 nilai investasi mengalami kontraksi

sebesar 2,06%, kemudian mampu tumbuh kembali pada tahun 2021 sebesar 2,49%.

Tabel 4.15: Nilai Investasi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	3.113,8	-	2.118,4	-
2018	3.438,2	10,42	2.205,6	4,12%
2019	3.721,6	8,24	2.289,7	3,81%
2020	3.798,25	2,06	2.242,46	-2,06%
2021	3.881,62	2,20	2.298,30	2,49%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

9. Investasi Jasa Keuangan dan Asuransi

Investasi jasa keuangan dan asuransi di Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2017-2019. Pada tahun 2017 nilai investasi atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2,1 Triliun, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi Rp 2,4 Triliun. Pada tahun 2020 investasi pada sektor ini mengalami kontraksi sebesar 0,09%, kemudian meningkat 4,04% di tahun 2021 menjadi Rp 2,5 Triliun.

Jika dilihat berdasarkan atas dasar harga konstan, pertumbuhan investasi yang ditanamkan di sektor jasa keuangan

dan asuransi terbesar terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 4,2%. Pertumbuhan terendah terhadi pada tahun 2021 sebesar 0,66%. Berikut adalah tabel pertumbuhan investasi sektor jasa keuangan dan asuransi di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.16: Nilai Investasi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	2.183,9	-	1.490,0	-
2018	2.337,1	7,01	1.552,6	4,2%
2019	2.453,8	5,00	1.614,0	3,96%
2020	2.451,70	-0,09	1.604,28	-0,6%
2021	2.550,76	4,04	1.614,91	0,66%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

10. Investasi Jasa Pendidikan

Tabel 4.17: Nilai Investasi Sektor Jasa Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	2.024,9	-	1.451,2	-
2018	2.163,7	6,86	1.525,1	5,09%
2019	2.361,3	9,14	1.637,6	7,38%
2020	2.471,63	4,67	1.685,81	2,94%
2021	2.479,17	0,31	1.693,41	0,45%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Investasi yang ditanamkan di sektor Jasa Pendidikan selama periode 2017-2021 selalu naik baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Tercatat investasi yang ditanamkan tahun 2021 atas dasar harga berlaku, untuk sektor pendidikan sebesar Rp 2,4 Triliun. Sementara pertumbuhan investasi pada sektor ini dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,38 persen.

11. Investasi Real Estate

Tabel 4.18: Nilai Investasi Sektor Real Estate di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	1.564,2	-	1.198,7	-
2018	1.728,3	10,50	1.271,8	6,10%
2019	1.873,3	8,40	1.348,3	6,01%
2020	1.958,76	4,56	1.385,90	2,79%
2021	1.994,61	1,83	1.406,46	1,48%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Sektor Real Estate merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Sidoarjo sebagaimana pada Tabel 4.18. Tercatat pertumbuhan investasi yang selalu positif menunjukan kinerja yang sangat menggembirakan. Hal ini tercermin dari nilai investasi yang ditanamkan pada sektor Real Estate. Nilai investasi atas dasar harga belaku di tahun 2017 sebesar Rp 1,5 Triliun dan terus meningkat di setiap tahunnya hingga tahun 2021 menjadi Rp 1,9 Triliun. Jika dilihat dengan harga konstan tahun 2010, investasi 2021 sebesar Rp 1,4 Triliun atau tumbuh sebesar 1,48% dari tahun sebelumnya (2020).

12. Investasi Pengadaan Listrik dan Gas

Tabel 4.19: Nilai Investasi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	1.798,0	-	1.148,3	-
2018	1.725,6	-4,02%	1.074,4	-6,44%
2019	1.743,1	1,01%	1.066,0	-0,78%
2020	1.666,70	-4,40%	1.018,39	-4,47%
2021	1.784,97	7,10%	1.078,33	5,89%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebagian besar ditangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut sebagian besar merupakan investasi BUMN. Kinerja investasi sektor listrik dan gas di Kabupaten Sidoarjo cenderung fluktuatif. Nilai investasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp 1,7 Triliun, mengalami kontraksi di tahun 2018 sebesar 4,02%. Pada tahun 2019 sektor ini mampu tumbuh sebesar 1,01%. Namun, di tahun 2020 kembali mengalami kontraksi sebesar 4,40%. Pada tahun 2021 sektor ini mampu tumbuh kembali sebear 7,10%

Jika dilihat dari harga konstan 2010, nilai investasi di sektor pengadaan listrik dan gas tahun 2017 sebesar Rp 1,1 Triliun dan mengalami kontraksi selama tiga tahun hingga 2020 sebesar 4,47%. Pada tahun 2021 sektor ini mampu tumbuh sebesar 5,89%.

13. Investasi Sektor Jasa Lainnya

Tabel 4.20: Nilai Investasi Sektor Jasa Lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	613,3	-	478,1	-
2018	662,8	8,06	499,7	4,53%
2019	712,2	7,46	530,5	6,17%
2020	614,83	-13,67	449,64	-15,25%
2021	648,64	5,50	462,02	2,75%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Investasi yang ditanamkan di sektor jasa lainnya atas dasar harga berlaku menunjukan trend positif dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Tercatat sebesar Rp. 613 miliar di tahun 2017 dan mengalami kenaikan setiap tahun hingga tahun 2019 mencapai Rp 712 miliar. Pada tahun 2020 investasi pada sektor ini mengalami kontraksi sebesar 13,67% menjadi Rp 614 miliar. Pada tahun 2021 mampu tumbuh Kembali sebesar 5,50%.

Jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan investasi pada 2017 hingga 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,17%. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 15,25%. Pada tahun 2021 mampu tumbuh Kembali sebesar 2,75%.

14. Investasi Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial

Tabel 4.21: Nilai Investasi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017-2021

Tahun	Nilai Invetasi Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHB (%)	Nilai Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Nilai Investasi ADHK (%)
2017	534,0	-	407,3	-
2018	568,8	6,52	432,8	6,27%
2019	616,0	8,31	459,0	6,05%
2020	679,76	10,35	497,07	8,30%
2021	729,41	7,30	519,60	4,53%

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

Investasi sektor jasa kesehatan pada tahun 2017 sebesar Rp 534 miliar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021. Pertumbuhan investasi yang ditanamkan di sektor jasa kesehatan tertinggi terjadi tahun 2020 sebesar 10,35 persen dan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,52 persen. Jikad dilihat berdasarkan harga konstan 2010, investasi pada sektor ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 8,30% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,53%.

4.1.4 Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestic maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Terkait PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Sidoarjo dapat diperhatikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	98.832.597,65	106.920.922,83	114.931.971,34	114.354.493,14	119.628.764,21
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.958.904,88	2.149.654,53	2.335.107,12	2.381.622,85	2.490.488,64
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.185.453,37	14.971.169,43	16.244.744,29	15.978.231,27	16.088.585,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	52.557.716,11	57.913.866,15	61.924.341,24	59.771.153,34	62.621.188,15
Perubahan Inventori	1.384.446,73	1.490.669,21	1.535.097,88	633.952,39	1.179.123,72

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Net Ekspor Barang dan Jasa	6.260.968,84	5.809.723,38	7.230.359,71	4.121.237,86	8.635.742,24
PDRB	174.180.087,58	189.256.005,53	204.201.621,58	197.240.690,84	210.643.892,26

* angka sementara ** angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (2022)

Tabel 4.22 menjelaskan bahwa PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 kategori, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pengeluaran atas perubahan inventori dan pengeluaran net-ekspor barang dan jasa. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar Rp 98.832.597,65 juta menjadi Rp 114.931.971,34 (2019). Tahun 2020 (Rp 114.354.493,14 juta) mengalami sedikit punurunan jika dibandingkan tahun 2019. Tahun 2021 kenaikan kembali sebesar Rp 119.628.764,21 juta.

PDRB ADHB menurut Pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tahun 2017 pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar Rp 1.958.904,88 juta, Rp 2.149.654,53 juta (2018), Rp 2.335.107,12 juta (2019), Rp 2.381.622,85 juta (2020) dan Rp 2.490.488,64 (2021). Pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2017 PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp 13.185.453,37 juta menjadi Rp

16.244.744,29 di tahun 2019. Selanjutnya terjadi penurunan pengeluaran menjadi Rp 15.978.231,27 juta (2020) dan meningkat kembali di tahun 2021 (Rp 16.088.585,30 juta).

Kondisi pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, tahun 2020 mengalami penurunan, dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali terjadi pada tiga jenis pengeluaran PDRB ADHK lainnya. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tahun 2017 sebesar Rp 52.557.716,11 juta; pada tahun 2018 sebesar Rp 57.913.866,15 juta; Tahun 2019 sebesar Rp 61.924.341,24 juta; Tahun 2020 turun menjadi Rp 59.771.153,34 juta; Tahun 2021 bertambah kembali sebesar Rp 62.621.188,15 juta. Perubahan inventori tahun 2017 sebesar Rp 1.384.446,73 juta, Rp 1.490.669,21 juta (2018), Rp 1.535.097,88 (2019), Rp 633.952,39 juta (2020) dan Rp 1.179.123,72 (2021). Sedangkan pengeluaran PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran Net-Ekspor Barang dan Jasa tahun 2017 sebesar Rp 6.260.968,84 juta, Rp 5.809.723,38 juta (2018), Rp 7.230.359,71 juta (2019), Rp 4.121.237,86 juta (2020) dan Rp 8.635.742,24 juta (2021). Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	**Tahun**				
	2017	**2018**	**2019**	**2020***	**2021****
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73132282.77	76642149.70	80332756.74	79318034.79	81145998.19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1187344.71	1271828.20	1350255.99	1353058.48	1383637.60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7538127.14	7950730.06	8323570.92	8043312.79	8052640.85

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2017	**2018**	**2019**	**2020***	**2021****
Pembentukan Modal Tetap Bruto	40635571.85	42893002.38	44841628.96	42963050.86	44139392.41
Perubahan Inventori	477444.53	483766.98	489822.08	198419.30	361637.70
Net Ekspor Barang dan Jasa	2068285.37	3311465.72	5154903.09	3429446.89	5917052.74
PDRB	125039056.37	132552943.04	140492937.79	135305323.11	141000359.48

* angka sementara ** angka sangat sementara

Sumber:BPS Kabupaten Sidoarjo (2022)

Pendistribusian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) berdasarkan pengeluarannya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 pengeluaran terbanyak adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dari tahun 2017 pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,74% tidak jauh berbeda pengeluaran di tahun 2021 yaitu sebesar 56,79%. Namun di tahun 2020 pengeluaran konsumsi rumah tangga naik menjadi sebesar 57,98%. Peningkatan pengeluaran di tahun 2020 terjadi pula pada kondisi pengeluaran konsumsi LNPRT (1,21%) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (8,10%). Sedangkan untuk pengeluaran lainnya dapat diperhatikan di dalam tabel 4.24.

Tabel 4.24: Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	56,74	56,50	56,28	57,98	56,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,12	1,14	1,14	1,21	1,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,57	7,91	7,96	8,10	7,64
4	PMTB	30,17	30,60	30,33	30,30	29,73
5	Inventori	0,79	0,79	0,75	0,32	0,56
6	Net Ekspor	3,59	3,07	3,54	2,09	4,10

Sumber: PDRB Kabupaten Sidoarjo (2022)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan pengeluaran diketahui berfluktuasi. Tahun 2017 (5,80%) mengalami kenaikan di tahun 2018 (6,01%) turun di tahun 2019 (5,99%) dan turun sangat tajam hingga berada di area negatif di tahun 2020 (-3,69%) dan perlahan naik Kembali di area positif di tahun 2021 (4,21%). Jika dilihat berdasarkan komponen pengeluaran, jenis pengeluaran terbanyak di tiap tahunnya berbeda-beda. Tahun 2017 pengeluaran yang terbanyak adalah jenis pembentukan modal tetap bruto sebesar 6,56%. Tiga tahun selanjutnya pengeluaran terbanyak adalah konsumsi LNPRT sebesar 7,12% (2018); 6,17% (2019); 0,21% (2020). Sedangkan di tahun 2021 berpindah pada jenis pengeluaran perubahan inventori yaitu sebesar 82,26%. Pertumbuhan perubahan inventori yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2020 yang berada di area pertumbuhsn negatif (-59,49%) mengindikasikan ketika tahun 2020 tidak ada pergerakan pada inventori. Data tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2017	**2018**	**2019**	**2020***	**2021****
1	Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	4,65	4,80	4,82	-1,26	2,30
2	Konsumsi LNPRT	2,41	7,12	6,17	0,21	2,26
3	Konsumsi Pemerintah	3,19	5,47	4,69	-3,37	0,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,56	5,56	4,54	-4,19	2,74
5	Perubahan Inventori	2,06	1,32	1,25	-59,49	82,26
6	Ekspor	-	-	-	-	-
7	Impor	-	-	-	-	-
	Total PDRB	5,80	6,01	5,99	-3,69	4,21

* angka sementara ** angka sangat sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Sidoarjo (2022)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Sidoarjo adalah 6,01 persen di tahun 2018, Tahun 2019 sebesar 6,00 persen, Tahun 2020 sebesar -3,70 persen dan tahun 2021 sebesar 6,79%. Dalam rentang tahun tersebut terjadi pertumbuhan PDRB ADHB dengan penurunan yang sangat tajam (2020) dan kenaikan sangat tajam pula (2021). Terkait laju pertumbuhan per indikator dapat diperhatikan pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2021 (%)

Jenis Pengeluaran	**Tahun**			
	2018	**2019**	**2020***	**2021****
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,1	7,49	-0,50	4.61
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,74	8,63	2,00	4.57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,54	8,51	-1,64	0.69
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,19	6,92	-3,48	4.77
Perubahan Inventori	7,67	2,98	-58,70	86
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7,20	24,45	-43,00	109
PDRB	6,01	6,00	-3,70	6.79

*** angka sementara ** angka sangat sementara**

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa di tahun 2021 pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,61 persen, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 4,57 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,69 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,77 persen, perubahan inventori sebesar 86% dan pengeluaran Net-Ekspor Barang Jasa sebesar 109%. Dengan demikian pertumbuhan pengeluaran terbesar adalah pengeluaran Net-Ekspor Barang dan Jasa.

Selain pertumbuhan PDRB ADHB menurut pengeluaran, Kabupaten Sidoarjo memiliki laju implisit PDRB ADHK menurut pengeluaran. Tahun 2017 laju implisit PDRB ADHK menurut pengeluaran sebesar 2,50 persen, tahun 2018 sebesar 1,80 persen, tahun 2019 sebesar 0,29 persen, dan tahun 2020 sebesar 2,48 persen. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27: Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2017	**2018**	**2019**	**2020***	**2021****
1	Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	3,23	2,55	0,77	2,26	-
2	Konsumsi LNPRT	2,45	2,32	1,78	2,26	-
3	Konsumsi Pemerintah	7,65	3,65	1,79	0,57	-
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,39	2,28	0,74	1,98	-
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
	Total PDRB	2,50	1,80	0,29	2,48	-

*** angka sementara ** angka sangat sementara**

Sumber: PDRB Kabupaten Sidoarjo (2022)

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, laju implisit PDRB ADHK di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. PDRB ADHK berdasarkan konsumsi rumah tangga tahun 2020 mencapai 2,26% lebih besar dibandingkan tahun 2019 (0,77%). Pengeluaran konsumsi LNPRT tahun 2020 sebesar 2,26% lebih besar dibandingkan tahun 2019 (1,78%). Pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2020 sebesar 0,57% lebih kecil dibandingkan tahun 2019 (1,79%). Pembentukan Modal Tetap bruto (PMTB) sebesar 1,98% lebih besar dibandingkan tahun 2019 (0,74%). Terkait perubahan inventori dan Net-ekspor

barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2017 tidak terdapat pengeluaran atas PDRB ADHK.

4.1.5 Industri Kecil, Menengah dan Besar

Kondisi industri di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perubahan. Jumlah unit usaha bertambah setiap tahunnya, jumlah tenaga kerja dan investasi bertambah tetapi tidak setiap tahun. Sedangkan nilai produksi tetap dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Jumlah unit usaha di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sebanyak 16.891unit usaha. Unit usaha yang ada kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 17.217unit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah unit usaha mengalami pertambahan sebanyak 326unit usaha.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sebanyak 166.232 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 169.138 orang. Sedangkan di tahun 2021 tidak terdapat penambahan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di tahun 2021 sebanyak 169.138 orang, jumlah yang tetap dari tahun sebelumnya (2020).

Kondisi peningkatan nilai investasi sama halnya dengan kondisi yang terjadi pada jumlah tenaga kerja. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021 tidak terdapat peningkatan dan jumlah nilai investasi tetap seperti tahun 2020. Nilai Investasi di tahun 2017 sebesar Rp 1.662.776.271.163 milliar menjadi Rp 1.882.151.844.151 milliar di tahun 2020. Sedangkan jumlah nilai investasi tahun 2021 tetap seperti jumlah nilai investasi pada tahun 2020.

Nilai produksi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar Rp 1.139.510.804 milliar. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan hingga tahun 2021. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28: Jumlah Unit Usaha Kecil Menengah dan Besar, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Tahun 2017-2021 Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
2017	16.891	166.232	1.662.776.271.163	1.139.510.804
2018	16.941	168.080	1.804.079.658.020	1.139.510.804
2019	17.073	168.632	1.852.241.974.151	1.139.510.804
2020	17.159	169.138	1.882.151.844.151	1.139.510.804
2021	17.217	169.138	1.882.151.844.151	1.139.510.804

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2022 (Diolah)

4.1.6 Investasi PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan dan konstruksi lain,mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak dan barang modal lainnya. Secara garis besar jenis barang modal yang telah disebutkan sebelumnya merupakan asset tetap. Berikut adalah perkembangan PMTB Atas Dasar Harga Berlaku dan PMTB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sidoarjo:

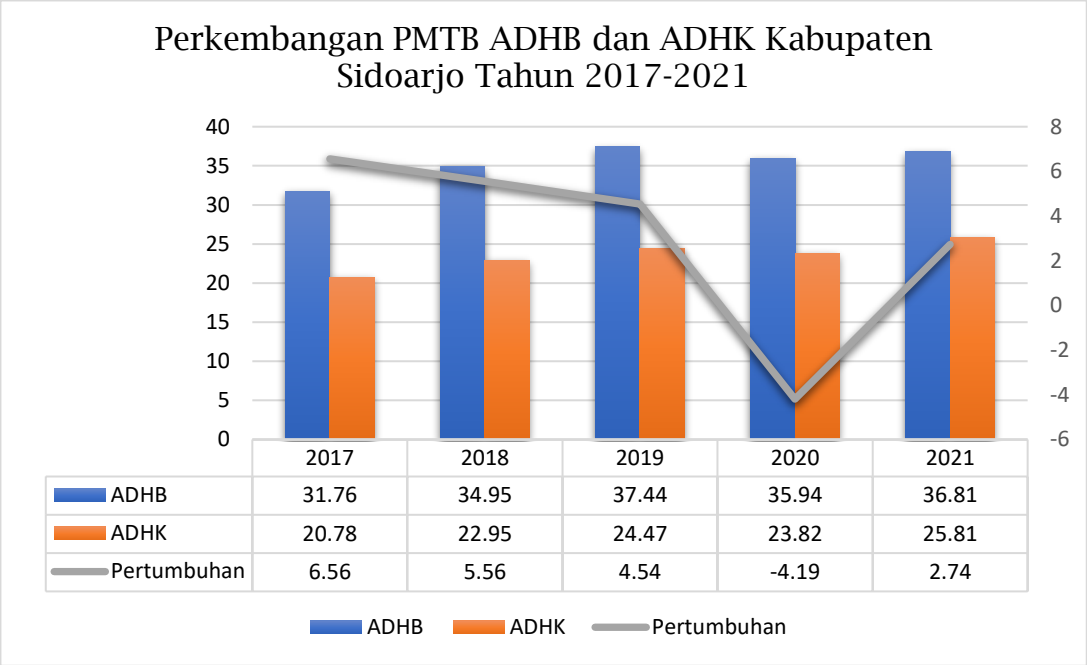

Gambar 4.6: Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Berlaku Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 di Kabupaten Sidoarjo. Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Gambar 4.6 menjelaskan bahwa tahun 2017 hingga tahun 2019 baik PMTB ADHB dan PMTB ADHK mengalami kenaikan. PMTB ADHB di tahun 2017 sebesar 31,76 menjadi 37,44 di tahun 2019 dan PMTB ADHK di tahun 2017 sebesar 20,78 menjadi 24,47 di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadikan PMTB ADHB sebesar 35,94 dan PMTB ADHK sebesar 23,82. Tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 36,81 PMTB ADHB dan 25,81 PMTB ADHK. Dari nilai tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar -4,19 dan naik 2,74 di tahun 2021.

4.2 Hasil Perhitungan dan Analisis ICOR

Penghitungan ICOR kabupaten Sidoarjo yang disajikan dalam analisa ini adalah ICOR yang dihitung dengan menggunakan lag-0,

lag-1 dan lag-2. Penghitungan menggunakan lag-0, lag-1 dan lag-2 tersebut didasarkan pada asumsi bahwa beberapa pembentukan modal/capital tidak langsung menghasilkan output pada saat itu juga tetapi bisa jadi baru menghasilkan output pada satu, dua, atau bahkan lebih dari dua tahun setelah terjadi pembentukan modal.

4.2.1 Hasil Perhitungan ICOR

Rerata ICOR Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 3,34 (Lag-0); Lag-1 sebesar 2,42: Lag-2 sebesar 1,6. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan di Kabupaten Sidoarjo belum dapat langsung menimbulkan kenaikan output pada tahun yang sama saat investasi ditanamkan. Terjadinya kenaikan output di Kabupaten Sidoarjo masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Nilai ICOR kabuaten Sidoarjo dapat diperhatikan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29: ICOR Lag-0 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

Tahun	Icor Lag-0	Icor Lag-1	Icor Lag-2
2017	5,92	5,40	5,11
2018	5,70	5,40	-8,26
2019	5,64	-8,64	7,87
2020 [1]	-8,28	7,54	-
2021 [2]	7,75	-	-
Rata-Rata	3,34	2,42	1,6

[1] Angka Sementara

[2] Angka Sangat Sementara

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Tabel 4.29 menunjukkan nilai ICOR tahun 2017 hingga tahun 2021. ICOR lag-0 Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Masing-masing berada pada level 5,92 (2017), level 5,70 (2018), level 5,64 (2019), level -8,28 (2020), level 7,75 (2021). Hal

tersebut mengindikasikan nilai ICOR Lag-0 tahun 2020 turun sangat tajam dan naik sangat tajam pula di tahun 2021. Sedangkan untuk ICOR lag-1 tahun 2021 dan ICOR Lag-2 tahun 2020 hingga tahun 2021 belum tersedia dikerenakan data untuk menghitung ICOR dalam waktu tertentu belum tersedia.

ICOR lag-0 Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 7,75. Artinya bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 7,75unit pada tahun yang sama. Dalam kaitannya dengan perekonomian dapat diartikan bahwa untuk menambah output sebesar Rp 1 Milliar diperlukan tambahan investasi sebanyak Rp 7,75 milliar pada tahun yang sama.

Kebutuhan ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Diketahui bahwa pada saat tahun 2019, nilai ICOR kabupaten Sidoarjo berada pada level 5,64 yang mengindikasikan untuk menambah 1 unit output dibutuhkan investasi sebanyak 5,64unit atau investasi sebanyak 5,64 milliar. Besarnya nilai ICOR tahun 2021 disebabkan oleh kondisi ICOR Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 (-8,28). Nilai ICOR Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 berada pada area negatif.

Nilai ICOR tahun 2017-2021 menjelaskan bahwa terdapat pergerakan yang tidak seperti biasanya. Kabupaten Sidoarjo harus dapat menghasilkan biaya output lebih besar dibandingkan tahun 2017-2019. Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output bisa terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu.

ICOR lag-1 pada seluruh sektor seperti Tabel 4.29 menunjukkan bahwa tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo berada pada level 5,40; Tahun 2018 sebesar 5,40; Tahun 2018 sebesar -8,64; Tahun 2020 sebesar 7,54. Rata-rata perhitungan ICOR dengan

rentang tahun 2017-2021 sebesar 2,42. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata ICOR lag-0. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 baru akan tampak hasilnya pada tahun berikutnya, yaitu 2021.

Hasil ICOR Lag-2 Kabupaten Sidoarjo seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 4.29 bahwa tahun 2017 ICOR lag-2 Kabupaten Sidoarjo sebesar 5,11; Tahun 2018 sebesar -8,26; Tahun 2019 sebesar 7,87; dan tahun 2020 hingga tahun 2021 belum tersedia data untuk menghitung ICOR Lag-2. Sedangkan untuk rata-ratanya sebesar 1,6, nilai yang lebih kecil dibandingkan ICOR lag-1 (2,42). Perhatikan Gambar 4.7 di bawah ini:

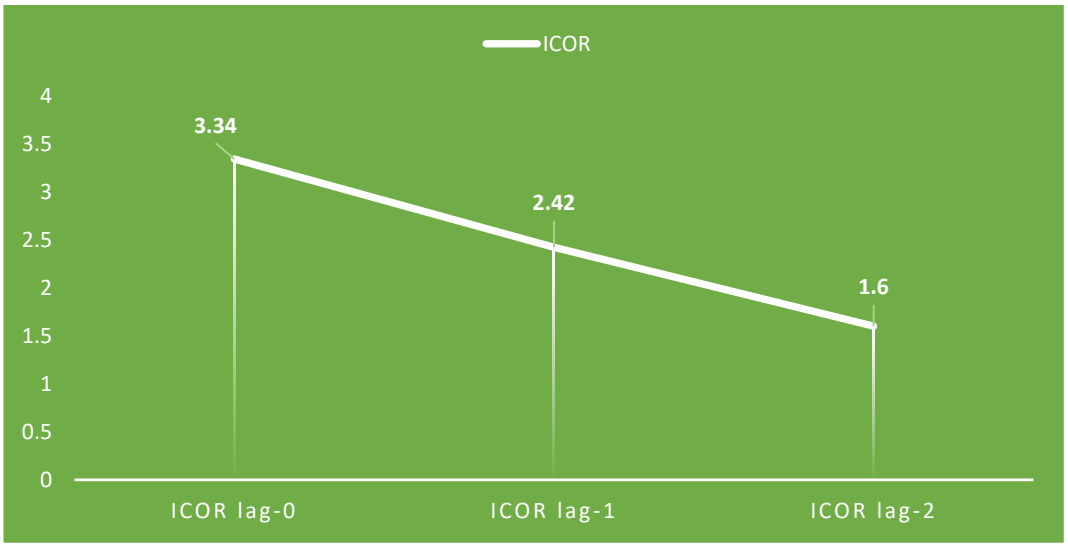

Gambar 4.7: Rata-rata nilai ICOR dengan penghitungan ICOR lag-0, ICOR lag-1 dan ICOR lag-2.

Jika diperhatikan berdasarkan rata-ratanya (Gambar 4.6), maka nilai ICOR lag-2 lebih rendah daripada nilai ICOR lag-1 apalagi jika dibandingkan dengan nilai ICOR lag-0 (3,34). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertambahan output secara signifikan

yang ditimbulkan oleh kegiatan investasi umumnya terjadi pada dua tahun berikutnya, yaitu setelah investasi dilakukan.

4.2.2 Hasil Perhitungan ICOR Per Sektor

Adapun nilai ICOR Lag-0 berdasarkan jenis sektor lapangan usaha di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Tahun 2017 dengan nilai ICOR Lag-0 tertinggi berada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,15 dan nilai ICOR lag-0 terkecil berada di sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 4,39. Tahun 2018 dengan nilai ICOR lag-0 tertinggi berubah pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,88 dan terkecil berada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -8,03. Tahun 2019 nilai ICor lag-0 terbesar di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 125,04 dan nilai ICOR terkecil pada sektor Pengadaan listrik dan Gas sebesar -40,50. Tahun 2020 terbesar berada pada industri pengolahan sebesar 32,66 dan terkecil pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar -52,24. Tahun 2021 nilai ICOR terbesar pada sektor jasa Pendidikan yang mencapai 69,75 dan terkecil berada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai ICOR -385,99. Sedangkan nilai ICOR lag-0 pada sektor lainnya dapat diperhatikan pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30: ICOR Lag-0 Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

Jenis Lapangan Usaha	ICOR lag-0					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,15	-8,03	125,04	11,88	-385,99	-47,98
Pertambangan dan Penggalian	10,90	15,88	19,17	-0,75	-3,72	8,29
Industri Pengolahan	6,02	4,87	3,90	32,66	6,70	10,83

Jenis Lapangan Usaha	ICOR lag-0					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pengadaan Listrik dan Gas	14,97	-4,70	-40,50	-6,79	5,63	-6,27
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	5,41	8,16	7,29	7,27	5,28	6,68
Konstruksi	4,93	5,64	5,72	-5,23	-4,27	1,35
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,43	5,98	5,68	-3,34	3,57	3,46
Transportasi dan Pergudangan	5,95	7,77	-2,74	-0,63	10,27	4,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,39	4,92	4,45	-4,16	5,74	3,07
Informasi dan Komunikasi	4,93	5,68	4,55	4,51	6,69	5,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,17	8,02	8,38	-52,24	47,55	4,58
Real estat	8,81	5,62	5,62	11,68	21,41	10,63
Jasa Perusahaan	6,25	5,13	5,43	20,62	20,64	11,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	14,39	8,17	8,69	-15,07	12,88	5,81
Jasa Pendidikan	10,38	6,68	4,64	11,11	69,75	20,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	6,77	5,48	5,59	4,14	7,21	5,84
Jasa Lainnya	8,42	7,46	5,49	-1,76	11,68	6,26

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Selain mengetahui nilai ICOR Lag-0 per sektor, Tabel 4.30 juga menunjukkan rata-rata ICOR pada 17 sektor jenis usaha di

Kabupaten Sidoarjo. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar -47,98; Pertambangan dan Penggalian dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 8,29; Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 10,83; Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai rata-rata ICOR sebesar -6,27; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 6,68; Konstruksi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 1,35; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 3,46; Transportasi dan Pergudangan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 4,12; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 3,07; Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,27; Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 4,58; Real Estate dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 10,63; Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 11,61; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,81; Jasa Pendidikan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 20,51; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,84; dan Jasa lainnya dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 6.26. Perhitungan ICOR lag-1 per sektor juga dapat diperhatikan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.31: ICOR Lag-1 Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021.

Jenis Lapangan Usaha	ICOR lag-1				Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-8,39	126,45	11,62	-391,84	-65,53
Pertambangan dan Penggalian	15,63	19,11	-1,07	-4,09	7,39
Industri Pengolahan	4,57	3,63	32,51	6,48	11,80

Jenis Lapangan Usaha	ICOR lag-1				Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	
Pengadaan Listrik dan Gas	-5,04	-41,38	-7,14	5,39	-12,04
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	7,87	7,07	6,98	5,03	6,74
Konstruksi	5,34	5,48	-5,57	-4,65	0,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	5,44	-3,67	3,31	2,69
Transportasi dan Pergudangan	7,48	-3,10	-0,95	10,10	3,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,62	4,18	-4,50	5,50	2,45
Informasi dan Komunikasi	5,38	4,29	4,21	6,47	5,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,73	8,18	-52,83	47,92	2,75
Real estat	5,32	5,38	11,42	21,40	10,88
Jasa Perusahaan	4,83	5,18	-4,40	20,62	6,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	8,49	-15,47	12,75	3,41
Jasa Pendidikan	6,38	4,38	10,85	70,43	23,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	5,18	5,34	3,84	7,00	5,34
Jasa Lainnya	7,17	5,24	-2,09	11,53	5,46

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Tabel 4.32 menunjukkan bahwa rata-rata ICOR Lag-1 tahun 2017-2020 Kabupaten Sidoarjo dari 17 sektor yang paling besar adalah sektor jasa Pendidikan sebesar 23,01. Sedangkan rata-rata terkecil adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar

-65,53. Terkait rata-rata pada sektor lainnya ialah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,39; Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 11,80; Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai rata-rata ICOR sebesar -12,04; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 6,74; Konstruksi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 0,14; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 2,69; Transportasi dan Pergudangan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 3,38; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 2,45; Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,09; Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 2,75; Real Estate dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 10,88; Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 6,55; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 3,41; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,34; dan Jasa lainnya dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,46.

Tabel 4.32: ICOR Lag-2 Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

Jenis Lapangan Usaha	ICOR lag-2			Rata-Rata
	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	132,10	11,75	-383,34	-79,82
Pertambangan dan Penggalian	18,80	-1,07	-5,86	3,95
Industri Pengolahan	3,41	30,27	6,45	13,38
Pengadaan Listrik dan Gas	-44,42	-7,30	5,67	-15,35
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	6,81	6,77	4,84	6,14
Konstruksi	5,18	-5,34	-4,95	-1,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,17	-3,52	3,64	1,76
Transportasi dan Pergudangan	-2,98	-1,07	15,26	3,73

Jenis Lapangan Usaha	ICOR lag-2			Rata-Rata
	2017	2018	2019	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,93	-4,23	5,95	1,88
Informasi dan Komunikasi	4,06	3,97	6,05	4,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	-51,52	48,46	1,60
Real estat	5,09	10,93	20,93	12,31
Jasa Perusahaan	4,87	-4,20	22,34	7,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,19	-15,11	13,08	2,05
Jasa Pendidikan	4,19	10,24	68,77	27,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,05	3,67	6,50	5,07
Jasa Lainnya	5,03	-1,99	13,67	5,57

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Tidak selamanya investasi yang ditanamkan pada suatu tahun tertentu akan berdampak pada penambahan output di tahun yang sama. Namun terdapat pula dampak dari adanya investasi di tahun berikutnya atau beberapa tahun kemudian. Hal tersebut dikarenakan investasi yang ditanamkan adalah investasi jangka menengah hingga Panjang sehingga penting menghitung ICOR lag-2 pada tiap sektor pula. Perhitungan ICOR lag-2 dapat diperhatikan pada Tabel 4.33

Rerata ICOR Lag-2 pada 17 sektor dalam rentang periode tahun 2017-2021 (Tabel 4.33) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -79,82; Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,95; Industri Pengolahan sebesar 13,38; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -15,35; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang sebesar 6,14; Konstruksi sebesar -1,70; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,76; Transportasi dan Pergudangan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 3,73; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 1,88; Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 4,69; Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 1,60; Real Estate dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 12,31; Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 7,67; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 2,05; Jasa Pendidikan dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 27,37; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,07; dan Jasa lainnya dengan nilai rata-rata ICOR sebesar 5,57.

Jika diperhatikan berdasrakan rata-rata maka dapat diketahui dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai ICOR terbesar berada pada sektor Jasa Pendidikan (22,73) dan sektor terkecil adalah sektor Pertanian, kehutanan, perikanan (-79,82). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tiap sektor pada tiap tahun dapat diketahui sektor dengan nilai terbesar ICOR tahun 2017 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 132,10. Sektor industry pengolahan, 30,27 (2018) dan sektor Jasa Pendidikan 68,77 (2019). Hal tersebut menjadikan terdapat perubahan alokasi investasi pada sektor lapangan usaha tiap tahunnya.

4.2.3 Analisis Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Pertumbuhan nilai ICOR lag-0 Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir mengalami kontraksi di tahun 2020 (-8,28). Pertumbuhan ICOR berada di area negatif sedangkan di tahun sebelumnya pertumbuhan ICOR berada di area positif. Hal tersebut mengindikasikan tidak adanya pergerakan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020. Benar adanya jika disandingkan dengan laju pertumbuhan pengeluaran di tahun 2020

lebih kecil daripada pengeluaran Kabupaten Sidoarjo pada tiga tahun sebelumnya (Tabel 4.25). Penyebab tidak adanya pergerakan ekonomi adalah adanya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 memasuki negara Indonesia di tahun 2020. Secara otomatis berdampak pula pada perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat dengan Pembatasan Sosial Berskla Besar (PSBB) menyebabkan aktivitas penyaluran barang dan jasa terganggu secara nasional maupun regional, mobilitas manusia berkurang akibat dilarang melakukan interaksi sosial (*sosial distancing*) maupun kontak fisik di ruang publik. Dengan kebijakan tersebut menjadikan tempat perbelanjaan, aktivitas industri, sekolah dan lain sebagainya di Kabupaten Sidoarjo juga ikut terdampak. Mall dan pasar sepi pengunjung, sekolah dirumahkan, perindustrian yang tidak beroperasi, tempat pariwisata yang tutup, dan UMKM Sidoarjo yang melemah. Dampak tersebut turut mempengaruhi jumlah PDRB Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2020 jumlah PDRB ADHB sebesar Rp 197.240,69 milliar lebih kecil daripada tahun 2019 (Rp 204.201,62 milliar) dan jumlah PDRB ADHK sebesar Rp 135.305,32 milliar (Tahun 2020) dari Rp 140.492,94 milliar (Tahun 2019). Penurunan jumlah PDRB tersebut menyebabkan nilai ICOR lag-0 tahun 2020 berada di area negatif mengingat perhitungan ICOR ditentukan oleh jumlah PDRB.

Tahun 2021, Indonesia mulai bangkit, pertumbuhan ekonomipun mulai menguat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% dan berada di area positif setelah di tahun 2020 berada di area negatif. Menguatnya pertumbuhan ekonomi nasional diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo (4,21%). Kebijakan pemerintah pusat yang sedikit melonggarkan

adanya pergerakan dan aktivitas masyarakat menjadikan Kabupaten Sidoarjo terdapat pergerakan pula.

Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan perekonomian dengan menyesuaikan keadaan yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penetapan PPKM Darurat diinstruksikan oleh Bupati Sidoarjo dengan menyesuaikan instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021. Seluruh sektor non esensial diberlakukan *Work From Home* (WFH) 100%. Sedangkan sektor non esensial diberlakukan 50% *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Secara lain masyarakat diizinkan beraktivitas dengan Batasan-batasan tertentu.

Pergerakan tersebut diikuti dengan penambahan jumlah PDRB Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021. Tahun 2021 PDRB ADHB sebesar Rp 210.643,89 milliar lebih besar dari tahun 2020 (Rp 197.240,69 milliar) dan PDRB ADHK sebesar Rp 141.000,36 milliar (2021) lebih besar pula dari tahun 2020 (Rp 135.305,32 milliar). Membaiknya jumlah PDRB mempengarhui pula nilai ICOR lag-0 tahun 2021 yaitu berada di area positif dengan nilai 7,75 yang berarti Kabupaten Sidoarjo membutuhkan investasi sebanyak 7,75 kali atau lebih besar untuk meningkatkan satuan output. Nilai tersebut memang lebih besar jika dibandingkan dengan Nilai ICOR lag gross di tahun 2019 yang hanya membutuhkan 5,64 kali investasi untuk meningkatkan satuan output. Namun lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 (-8,28). Kondisi tersebut merupakan kondisi yang wajar mengingat di tahun 2020 tidak ada pegerakan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo membutuhkan investasi sebanyak 7,75 untuk meningkat satuan output. Kebutuhan

investasi yang besar pasca pandemi untuk memperbaiki semua sektor di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk membuat inovasi agar pelayanan tetap berjalan dan meminimalisir kerugian. Sehingga perekonomian tetap berjalan di tengah kondisi pasca pandemi.

Adapun proyeksi rata-rata ICOR lag-0 sebesar 3,34; lag-1 sebesar 2,42; dan Lag2 sebesar 1,6 dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hasil rata-rata yang menurun dapat diartikan bahwa investasi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo akan menghasilkan output (pendapatan) yang besar dua tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pemaparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama empat tahun terakhir (2017-2021), berdasarkan peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha diantaranya industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi.
2. Perkembangan investasi di Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo cukup baik dan cukup efisien. BPS mencatat bahwa selama kurun waktu 2020-2021 penanaman investasi tertinggi berada di sektor industri pengolahan; berikutnya disusul dengan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda dan kategori konstruksi.
3. Berdasarkan jenis pengeluarannya, pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).
4. Hasil rata-rata ICOR lag-2 memperlihatkan angka 1,6 lebih rendah daripada rata-rata ICOR Lag-1 (2,42) maupun rata-rata ICOR lag-0 (3,34). Hal tersebut dapat diartikan bahwa keefektifan investasi di Kabupaten Sidoarjo baru dapat menghasilkan tambahan output (pendapatan) secara signifikan setelah adanya kegiatan investasi yang pada umumnya terjadi setelah dua tahun berikutnya.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan produktivitas investasi atau menurunkan ICOR Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang, perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian potensi sumber daya alam (SDA) daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
2. Penerapan kebijakan yang memihak kepada sub sector industri kecil dan mikro agar sub sektor industri kecil dan mikro dapat terus tumbuh. Kebijakan tersebut dapat berupa kemudahan perizinan, insentif keringanan pajak, peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku industri kecil dan mikro, dan lain sebagainya
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya terkait dengan perizinan penanaman investasi di Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat menarik investor lokal.
4. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi lebih difokuskan pada lapangan usaha yang efisien investasinya *Incremantal Capital Output Rasio* (ICOR) dengan nilai ICOR rendah yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; serta konstruksi.

REFERENSI

Abdurachmat, I dan Maryani, E. (1998). Geografi ekonomi (diktat kuliah). Bandung : jurusan pendidikan geografi FPIPS IKIP Bandung

Adipuryanti, N.L.P.Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol.11 (1).

Aditya, R. (2022). aftar Lengkap UMP 2022 di 34 Provinsi Seluruh Indonesia yang Menarik untuk Disimak. Suara.com. https://www.suara.com/news/2022/05/23/123239/daftar-lengkap-ump-2022-di-34-provinsi-seluruh-indonesia-yang-menarik-untuk-disimak

Amalia, R.R., & Nurhayati, S.F. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Jawa Timur Tahun 2020.* http://eprints.ums.ac.id/100368/

Arifin, M., dan Suhala, S., 1997. Bahan Galian Industri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM), Bandung.

Asyhadie, Zaeni. 2008. Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada. Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston, 2009. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, alih bahasa Ali Akbar Yulianto, Buku satu, Edisi sepuluh. Jakarta : PT. Salemba Empat.

Daldjoeni, N. 1992. Geografi Baru Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Alumni.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta. Penerbit: Erlangga.

Ernita, D., Amar, S., & Syofyan,E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1(2): H: 176-193.

Hestaningrum. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Pemanufakturan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi.Universitas Diponegoro.

Joni dan Lina. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi struktur Modal". Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12, No. 2, hlm. 81-96.

Kartasapoetra. 1987. Teknologi Penyuluhan Pertanain. Jakarta: Bina Aksara.

Kumparan. (2022). UMR Tertinggi di Indonesia 2022 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. https://kumparan.com/berita-hari-ini/umr-tertinggi-di-indonesia-2022-tingkat-kabupaten-kota-dan-provinsi-1yN9R3EIldP/full

Payaman, J , Simanjutak , 1985, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal

Sadono, Sukirno. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Supriyanti, H. (2020). UMK Dinilai Cukup Tinggi, 11 Perusahaan Pindah dari Sidoarjo. Harian Bhirawa. https://www.harianbhirawa.co.id/umk-dinilai-cukup-tinggi-11-perusahaan-pindah-dari-sidoarjo/

Swanitarini, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2011-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*. Vol. 5 (5)

Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius

Taufiq, M. (2021). Banyak Perusahaan Hengkang Dari Sidoarjo, Pengangguran Melonjak Tertinggi Seprovinsi. Suara Jatim. https://jatim.suara.com/read/2021/08/06/132352/banyak-perusahaan-hengkang-dari-sidoarjo-pengangguran-melonjak-tertinggi-seprovinsi

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal